

BAB II

MULTIKULTURALISME DAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

A. Multikulturalisme: Basis Ideologi Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural lahir bersamaan dengan berkembangnya wacana multikulturalisme di Barat. Sehingga sulit untuk menafikan adanya hubungan antara keduanya. Bukti bahwa multikulturalisme telah mempengaruhi bidang sosial, politik, dan terutama pendidikan, dapat ditemukan dalam revisi kurikulum, khususnya di Eropa dan Amerika Utara, dan perluasan sastra Barat dan kanon lain yang dimulai pada kuartal terakhir abad ke-20. Kurikulum dari level pendidikan dasar hingga level perguruan tinggi direvisi dan diperluas untuk memasukkan kontribusi kelompok budaya minoritas dan terabaikan. Revisi itu dirancang untuk mengoreksi apa yang dianggap sebagai perspektif Eurosentris palsu yang terlalu menekankan kontribusi kekuatan kolonial Eropa kulit putih dan kurang menekankan kontribusi yang dilakukan oleh masyarakat adat dan masyarakat kulit berwarna. Selain koreksi itu, kontribusi yang dibuat oleh kelompok budaya di berbagai bidang telah ditambahkan ke kurikulum untuk memberikan pengakuan khusus apa yang sebelumnya diabaikan.¹

Dengan demikian, pendidikan multikultural adalah bagian yang tak terpisahkan dari wacana multikulturalisme di Barat, sehingga dapat dipastikan

¹Jennifer L. Eagan, "Multiculturalism," *Encyclopædia Britannica*, last modified 2020, accessed August 1, 2020, <https://www.britannica.com/topic/multiculturalism>.

bahwa pendidikan multikultural dipengaruhi oleh ide-ide atau konsep-konsep yang lahir dari multikulturalisme. Karl Mannheim menegaskan bahwa sebuah gagasan, konsep, ide, atau pemikiran tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya yang melahirkannya. Corak pemikiran seseorang tidak dapat dipahami secara memadai selama asal-usul sosialnya tidak dipahami. Dalam hal ini, pandangan dunia (*weltanschauung/ worldview*) yang berada di balik sebuah konsep memainkan peran metodologis yang sangat penting.² Oleh karena itu, pemahaman tentang wacana multikulturalisme menjadi sebuah keharusan untuk dapat memahami substansi dari pendidikan multukultural.

1. Pengertian Multikulturalisme

Kata '*multiculturalism*' (kata benda) dan '*multiculturalist*' (kata sifat) merupakan kosa kata yang relatif baru dan tidak ditemui sebelum akhir 1960-an dan awal 1970-an.³ Dalam pengamatan Glazer, kata ini muncul empat puluh kali di surat kabar utama Amerika pada tahun 1981, dan 2.000 kali pada tahun 1992.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa wacana multikulturalisme begitu menarik perhatian dalam diskursus pemikiran Barat modern.

Multikulturalisme adalah wilayah yang rumit dan kontroversial yang mencakup berbagai macam kebijakan dan praktik. Definisi yang muncul dari multikulturalisme *mainstream* bersifat ambigu, hal ini dirasakan berbeda

²Karl Mannheim, "Kata Pengantar" dalam *Ideology and Utopia an Introduction to the Sociology of Knowledge*, Terj. Louis Wirth dan Edward Shils, (London: Routledge and Kegan Paul, 1954), 2.

³ Michel Wieviorka, "Is Multiculturalism The Solution?," *Ethnic and Racial Studies* 21, no. 5 (2010): 881.

⁴ Nathan Glazer dalam *ibid.*, 883.

tergantung pada, misalnya, pandangan politik seseorang. Istilah Multikulturalisme, menurut Kymlicka, meliputi beragam bentuk pluralisme budaya yang masing-masing menancapkan tantangannya sendiri. Oleh karenanya, generalisasi tujuan atau konsekuensi dari multikulturalisme menjadi sangat menyesatkan.⁵ Multikulturalisme memiliki banyak makna, dapat berupa kebijakan, program, praktik, pendekatan pendidikan, konsep sosiologis, simbol, ideal, ideologi, teori, atau deskripsi masyarakat. Multikulturalisme bukan sekedar parade budaya dan festival seni etnik seperti yang dipahami secara sempit oleh sebagian orang.⁶

Perlu diklarifikasi perbedaan antara "multikultural" dan "inter-kultural", karena kedua label ini sering digunakan dalam literatur yang berkaitan dengan keanekaragaman budaya. Meskipun tampak serupa, ada konsensus umum bahwa keduanya tidak sama. Tidak ada penggambaran yang jelas dan eksplisit tentang perbedaan antara label-label ini. Namun, perbedaan di antara keduanya jelas dalam arti semantik dan penggunaan dalam literatur. "Multikultural" menunjuk pada pluralitas budaya dalam konteks tertentu, sementara "inter-kultural" mengacu pada bentuk pertukaran atau interaksi antara budaya atau perspektif budaya.⁷

Istilah lain yang juga sering dihubungkan dengan multikulturalisme adalah pluralisme, kedua kata ini sering digunakan dalam arti yang sama. Perbedaan utama

⁵ Lihat Disertasi yang ditulis oleh Yoko Motani, "The Role of Education in a Multicultural Society: The Theoretical Foundations of Mainstream Multiculturalism and Their Implications for Educational Policies" (University of Toronto, 2001), 2–3.

⁶Paul Gingrich and Christopher J Fries, "Views on Multicultural Principles and Problems-Implications for Research and Policy," in *Canada: Global Model for a Multicultural State*, 2002, 4.

⁷Lily A. Arasaratnam, "A Review of Articles on Multiculturalism in 35 Years of IJIR," *International Journal of Intercultural Relations* 37, no. 6 (2013): 677, <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2013.09.006>.

antara multikulturalisme dan pluralisme adalah bahwa multikulturalisme tidak memiliki budaya dominan, sedangkan pluralisme memiliki budaya dominan. Multikulturalisme mengacu pada ko-eksistensi beragam kelompok agama, etnis atau budaya dalam suatu masyarakat. Sebaliknya, pluralisme budaya mengacu pada fenomena di mana kelompok minoritas berpartisipasi penuh dalam masyarakat dominan.⁸

Istilah multikulturalisme menurut Heywood memiliki dua pemaknaan, yakni multikulturalisme deskriptif dan multikulturalisme normatif. Multikulturalisme deskriptif merujuk kepada keragaman budaya yang timbul dalam masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih kelompok yang keyakinan dan praktiknya menghasilkan rasa identitas kolektif yang khas. Multikulturalisme dalam pengertian ini merujuk pada keragaman komunal yang muncul dari perbedaan ras, etnis atau bahasa. Sedangkan dalam pengertian normatif, multikulturalisme menyiratkan dukungan positif dalam bentuk pengakuan dan penghormatan atas keragaman komunal tersebut. Dalam pengertian ini, ia mengakui pentingnya keyakinan, nilai-nilai dan cara hidup dalam membangun rasa harga diri untuk individu dan kelompok yang sama.⁹ Multikulturalisme normatif melibatkan kebijakan secara sadar, terarah, dan terencana dari pemerintah dan elemen masyarakat untuk mewujudkan multikulturalisme. Gingrich & Fries mengidentifikasi multikulturalisme—dengan pendekatan sosiologis—sebagai cara

⁸ Hasa, "What Is the Difference Between Multiculturalism and Pluralism," *Pediaa*, last modified 2020, accessed August 1, 2020, <https://pediaa.com/what-is-the-difference-between-multiculturalism-and-pluralism/#Multiculturalism>.

⁹ Andrew Heywood, *Political Ideologies: An Introduction*, 3rd ed. (Palgrave: McMillan, 2007), 53.

yang dapat digunakan individu dan kelompok untuk saling berhubungan dan mendekati keanekaragaman dalam cara yang damai, pengertian, dan positif.¹⁰

2. Tipologi Multikulturalisme

Keragaman makna multikulturalisme, memaksa sebagian ahli untuk memetakan tipologi multikulturalisme ke dalam beberapa pengertian. Bloemraad, misalnya, membedakannya ke dalam tiga pengertian, yaitu: multikulturalisme demografis, multikulturalisme sebagai filsafat politik, dan multikulturalisme sebagai kebijakan publik.¹¹ Dengan bahasa yang hampir sama dengan Bloemraad, Calma memetakan multikulturalisme ke dalam tiga tipologi, yaitu: deskripsi demografis masyarakat global, seperangkat norma, dan kebijakan pemerintah.¹² Sedangkan menurut Eldering, untuk memahami multikulturalisme di masyarakat, harus dibedakan ke dalam beberapa tipologi pemaknaan, yaitu multikulturalism sebagai: realitas objektif, ideology, kebijakan resmi, dan praktek sosial.¹³ Pandangan senada dengan Eldering juga diungkap oleh Dietlind Stolle dkk., bahwa istilah multikulturalisme, digunakan untuk: 1) gambaran kehidupan sosial yang merujuk kepada etnik, agama dan/atau keragaman kultural dalam sebuah populasi; 2) posisi ideologis dalam melihat keragaman kultural sebagai sesuatu yang harus

¹⁰Gingrich and Fries, "Views on Multicultural Principles and Problems-Implications for Research and Policy."

¹¹Irene Bloemraad, "The Debate Over Multiculturalism: Philosophy, Politics, and Policy," *Migration Policy Institute*, September 2011, accessed December 12, 2019, <http://www.migrationpolicy.org/article/debate-over-multiculturalism-philosophy-politics-and-policy>.

¹²Tom Calma, *Multiculturalism: A Position Paper by the Acting Race Discrimination Commissioner* (Sydney: Acting Race Discrimination Commissioner, Human Rights and Equal Opportunity Commission, 2007), 2.

¹³Lotty Eldering, "Multiiculturalism and Multicultural Education in an International Perspective," *Antropology and Education Quarterly* 27, no. 3 (1996): 315.

diakui dan dihargai; 3) seperangkat kebijakan yang mengakui keragaman budaya dan bertujuan untuk meminimalisir proses integrasi.¹⁴

Tipologi multikulturalisme yang dikemukakan oleh para ahli, sebagaimana dipaparkan di atas, pada prinsipnya memiliki beberapa kesamaan makna dengan istilah yang berbeda, seperti tergambar pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Tipologi Multikulturalisme

Tipologi Multikulturalisme	
Heywood	Deskriptif Normatif
Bloemraad	Multikulturalisme demografis Filsafat politik Kebijakan publik
Calma	Deskripsi demografis masyarakat global Seperangkat norma Kebijakan pemerintah
Eldering	Realitas objektif Ideologi Kebijakan resmi Praktik sosial
Dietlind Stolle dkk	Deskripsi realitas sosial Ideologi Kebijakan publik

Sumber data: dipetakan dari pandangan: Heywood, Bloemraad, Calma, Eldering, serta Dietlind Stolle, dkk.¹⁵

Dalam tulisan ini, perdebatan seputar multikulturalisme dalam berbagai dimensinya tidak akan diulas secara detil, melainkan hanya memberi gambaran umum sekedar untuk memberikan ilustrasi setting sosial yang melatari lahirnya

¹⁴Dietlind Stolle et al., "Religious Symbols, Multiculturalism and Policy Attitudes," *Canadian Journal of Political Science* 49, no. 2 (2016): 336.

¹⁵ Heywood, *Political Ideologies: An Introduction*, 53; Bloemraad, "The Debate Over Multiculturalism: Philosophy, Politics, and Policy"; Tom Calma, *Multiculturalism: A Position Paper by the Acting Race Discrimination Commissioner* (Sydney, 2007), 2; Eldering, "Multiiculturalism and Multicultural Education in an International Perspective," 315; Stolle et al., "Religious Symbols, Multiculturalism and Policy Attitudes," 336.

pendidikan multikultural. Untuk memudahkan pembahasan, pada bagian ini tipologi pengertian multikulturalisme dipetakan ke dalam tiga kategori yang dirangkum dari tipologi yang dipaparkan pada tabel di atas, yaitu:

- Multikulturalisme deskriptif (Heywood), termasuk di dalamnya multikulturalisme demografis (Bloemraad, Calma), atau realitas objektif dalam istilah Eldering dan Stolle;
- Multikulturalisme normatif (Heywood), termasuk dalam kategori ini adalah multikulturalisme sebagai filsafat politik (Bloemraad), seperangkat norma dalam menyikapi keberagaman (Calma); dan sebagai ideologi (Eldering, Stolle);
- Multikulturalisme dalam praktik. Kategori ini mencakup multikulturalisme yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan publik (Bloemraad), atau kebijakan pemerintah dalam istilah Calma dan kebijakan resmi dalam istilah Eldering dan Stolle. Lebih lanjut, Eldering menambah satu unsur dalam kategori ini, yaitu multikulturalisme dalam praktik sosial.

Dengan demikian, multikulturalisme dapat dipetakan ke dalam tiga pemaknaan, yaitu: multikulturalisme deskriptif, multikulturalisme normatif dan multikulturalisme dalam praktik, sebagaimana dipaparkan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Tipologi Pemaknaan Multikulturalisme

Multikulturalisme Deskriptif	Multikulturalisme Normatif	Multikulturalisme dalam Praktik
Multikulturalisme demografis sebagai	- Filsafat Poltik	- Kebijakan publik

realitas objektif masyarakat global	- Ideologi, seperangkat norma	- Praktik dalam realitas sosial
-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

a. Multikulturalisme deskriptif

Multikulturalisme sebagai sebuah realitas objektif yang oleh sebagian ilmuwan diistilahkan dengan multikulturalisme demografis atau multikulturalisme deskriptif, adalah sebuah fakta historis masyarakat global saat ini. Jika istilah kultur dihubungkan dengan ras, etnis, agama, bahasa, tradisi dan beragam keunikan budaya lainnya, maka tidak ada satu pun negara modern saat ini yang bersifat monokultural. Oleh karena itu, multikulturalisme objektif tidak banyak diperdebatkan, para ilmuwan sepakat akan realitas keragaman budaya sebagai fenomena riil masyarakat global. Meski demikian, perluasan makna kultur dalam istilah multikulturalisme bukan hanya terbatas pada konsep budaya yang telah mapan (*mainstream*), tetapi juga mencakup sub-kultur. Varian budaya dalam konsep multikulturalisme, oleh Bikhu Parekh dipetakan ke dalam tiga kategori yang paling dominan, yaitu:

- 1) *Communal diversity* (keanekaragaman komunal), mencakup sejumlah komunitas yang sadar diri, terorganisir dengan baik dan menjalani kehidupan dengan sistem keyakinan dan praktek yang beragam, misalnya: kelompok imigran, komunitas kepercayaan, dll.
- 2) *Perspectival diversity* (keanekaragaman perspektif), mencakup beberapa anggota masyarakat yang kritis terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai setral kebudayaan yang mapan dan berusaha menyatakannya secara bersama dengan orang-orang atau kelompok yang sesuai. Contohnya,

kaum feminis yang mengkritisi bias patriarki yang tertanam, kelompok religius yang menyerang orientasi sekuler.

- 3) *Subcultural diversity* (keanekaragaman subkultural), mencakup mereka yang termasuk bagian dari budaya umum, tetapi menjalankan keyakinan dan praktek yang berbeda berkenaan dengan wilayah kehidupan tertentu, atau menjalani gaya hidup mereka sendiri yang relatif sangat berbeda. Misalnya, kelompok-kelompok transgender, anak-anak jalanan, orang tua tunggal, gay, lesbian, dll.¹⁶

Dengan demikian, keragaman budaya (*culture*) dalam pemaknaan multikulturalisme tidak hanya terbatas pada budaya besar (*communal diversity*) tetapi juga mencakup perbedaan-perbedaan kelompok yang tercipta dalam struktur budaya besar tersebut, bahkan termasuk kelompok-kelompok yang terlahir dari struktur sosial (misalannya kelompok-kelompok yang termarginalkan secara sosial-ekonomi),¹⁷ kelompok yang terpinggirkan, termasuk Afrika-Amerika, perempuan, kelompok LGBT, dan penyandang disabilitas.¹⁸

¹⁶ Lihat selengkapnya Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya Dan Teori Politik* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 16–17.

¹⁷ Dalam konteks ini Post Strukturalisme mengkritisi pendekatan multikulturalisme yang menurut mereka tidak menyelesaikan masalah. Identitas kultural bukanlah hal yang statis tetapi dikonstruksi oleh struktur kekuasaan, oleh karenanya menjadi penting untuk mencermati pola struktur kekuasaan untuk mewujudkan kesetaraan. Pengakuan terhadap keberagaman dan pemberian kesempatan yang sama, tidak akan bermakna mana kala struktur kekuasaan tidak mendukung hal itu. Agus Wahyudi, “Kritik Post Strukturalisme Terhadap Pendekatan Multikulturalisme,” *Sosial Politik Filsafat UGM*, last modified 2017, accessed April 1, 2018, <https://sosialpolitik.filsafat.ugm.ac.id/kritik-post-strukturalisme-terhadap-pendekatan-multikulturalisme/>.

¹⁸ Sarah Song, “Multiculturalism,” ed. Edward N. Zalta, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2017, <https://plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/multiculturalism/>.

b. Multikulturalisme normatif

Multikulturalisme sebagai norma, atau dalam istilah Heywood, multikulturalisme normatif, adalah konsepsi normatif dalam melihat dan menyikapi realitas multikultural. Termasuk dalam kategori ini adalah konsep-konsep normatif tentang multikulturalisme, baik itu sebagai filsafat, ideologi atau paradigma yang berbasis pada nilai-nilai tertentu (budaya, agama, dll.). Wacana multikulturalisme normatif yang berkembang dewasa ini, khususnya di Barat, dapat dipetakan ke dalam beberapa kategori.

1) Multikulturalisme sebagai Filsafat Politik

Multikulturalisme, dalam pengertian filosofis, adalah istilah luas yang berarti "memikirkan kembali monokulturalisme tradisi intelektual Barat". Dalam konteks ini, multikulturalisme adalah prinsip teoretis yang menegaskan kesetaraan budaya yang berbeda, secara fundamental menolak untuk membangun hierarki di antara mereka dan mengaburkan batas antara budaya "tinggi" dan "rendah". Konsep ini mendapat dukungan teoritis dari karya-karya filsuf postmodernis dan post-strukturalis, seperti Foucault, Lyotard, Deleuze, Derrida dan lain-lain.¹⁹

Michael Murphy memandang multikulturalisme sebagai cabang filsafat politik yang mengeksplorasi hubungan antara keanekaragaman budaya, kebebasan manusia dan kesejahteraan, sambil menawarkan pembenaran untuk mengakomodasi klaim minoritas budaya dalam lembaga hukum dan politik serta

¹⁹Zhanbolat Kosherbayev Aliya Mombek, Gulnar Kuzhagulova, and Nasipkhanym Kamalova Gulzhikhan Nurysheva Viacheslav Remizov, "Postmodernism: Theory and Practice of Multiculturalism in Europe," *Calitatea Vieții* 27, no. 2 (2016): 144–160.

kebijakan publik.²⁰ Pertanyaan tentang keragaman etno-budaya menjadi tema sentral dan mungkin dominan dalam filsafat politik dalam beberapa dekade terakhir. "Multikulturalisme" menjadi posisi yang dikemukakan sebagai jawaban oleh sejumlah besar filsuf politik, yang berpendapat bahwa problematis masyarakat multikultural membutuhkan pertimbangan ulang terhadap konsep dan argumen filsafat politik yang mapan.²¹

Sejak akhir 1980-an, multikulturalisme telah menjadi tema utama dalam filsafat politik.²² Hasil analisis Colombo terhadap perdebatan isu multikulturalisme di masyarakat Barat era 1990-an, menunjukkan bahwa sebagian besar perdebatan tentang multikulturalisme dimonopoli oleh filsafat politik dalam upaya mengembangkan teori keadilan yang koheren dan dapat mengakomodir hak-hak kelompok serta pengakuan atas perbedaan budaya. Sebagai teori politik, multikulturalisme menantang filosofi liberal universalisme yang menganggap manusia sebagai agen kehendak bebas yang rasional, yang kebebasannya dapat diberikan hanya melalui hak individu.²³

²⁰ Michael Murphy, "Multiculturalism Oxford," *Oxford Bibliographies*, last modified 2018, accessed June 11, 2019, <https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195396577/obo-9780195396577-0361.xml>.

²¹Hans Vermeulen and Boris Slijper, "Nationalism, Regional Multiculturalism and Democracy," in *Nationalism, Regional Multiculturalism and Democracy*, ed. Ana Devic (Germany: Center for European Integration Studies, 2002), 7.

²² Patrick Loobuyck, "Liberal Multiculturalism," *Ethnicities*, *SAGE Publications* 5, no. 1 (2005): 109.

²³Enzo Colombo, "Multiculturalisms : An Overview of Multicultural Debates in Western Societies," *Current Sociology* 63, no. 6 (2015): 5. Titik tekan liberalisme terletak pada individu, sehingga substansi negara ditafsirkan sebagai sebuah instrumen kebebasan fungsional demi kepentingan individu. Lihat: Otto Gusti Madung, "Liberalisme versus Perfeksionisme? Sebuah Tinjauan Filsafat Politik Tentang Relasi Antara Agama Dan Negara," *Jurnal Ledalero* 12, no. 2 (2017): 176.

Para multikulturalis melemparkan tuduhan bahwa tujuan liberalisme (secara tersirat) adalah untuk mengabaikan atau menyeragamkan perbedaan. Sementara dalam pandangan para multikulturalis, orang tidak hanya menuntut perlakuan yang sama, tetapi yang lebih penting, pengakuan identitas kultural mereka sebagai anggota komunitas budaya tertentu. Hak-hak sipil liberal tidak cukup memperhatikan identitas budaya ini. Sebaliknya, para liberalis juga melemparkan kritik terhadap multikulturalisme sebagai anti-universalistik, anti-liberal, dan dengan demikian menyangkal cita-cita Pencerahan. Multikulturalis dituduh mendukung politisasi identitas kelompok budaya, dengan demikian secara paradoks, menghambat integrasi minoritas. Mereka melakukan ini atas nama 'hak minoritas'—hak yang diklaim semata-mata berdasarkan keanggotaan kelompok budaya tertentu dan bertujuan melanggengkan dan melindungi identitas budaya—yang tidak ada tempatnya dalam liberalisme.²⁴

Berbeda dengan gagasan liberal yang menekankan persatuan dan kesamaan, perspektif multikulturalis justru mengapresiasi keragaman bukan keseragaman. Pengakuan hak individu tidak cukup karena mengandaikan gagasan yang tidak koheren dari individu sebagai person yang terpisah dari hubungan sosial. Orang dapat membangun identitas yang mandiri dan percaya diri hanya melalui dialog dengan orang lain, merasa menjadi bagian dari komunitas tertentu dan berbeda.²⁵

Para pembela liberalisme mengamati bahwa demokrasi liberal membutuhkan dasar budaya bersama dan perasaan yang kuat dalam mewujudkan

²⁴ Loobuyck, "Liberal Multiculturalism," 109.

²⁵ Colombo, "Multiculturalisms: An Overview of Multicultural Debates in Western Societies," 5.

masyarakat sipil. Politik perbedaan, menurut kaum liberalis, kontras dengan politik solidaritas karena pengakuan hak-hak kelompok memecah belah masyarakat, mempromosikan 'kehidupan paralel', mendegradasi kesetiaan kepada negara-bangsa, mengurangi kebebasan individu dan merusak politik redistribusi.²⁶

Pada dasarnya, multikulturalisme menuntut politik pengakuan. Ini menyiratkan bahwa identitas budaya minoritas etnis dan nasional harus diakui, dan bahwa budaya minoritas ini harus memiliki hak khusus untuk mengekspresikan dan mempertahankan budaya mereka. Karena itu, politik dan budaya seharusnya tidak menjadi dua bidang yang terpisah. Di sinilah titik persoalannya, dalam multikulturalisme, politik secara aktif mencampuri budaya, sedangkan dalam liberalisme, budaya dan politik dipandang terpisah. Prinsip liberal berpandangan bahwa Negara harus memegang posisi netral dalam hal budaya. "Budaya" secara eksklusif milik kehidupan pribadi. Menurut Charles Taylor, sebagaimana dikutip oleh Mennens, prinsip ini tidak dapat dipertahankan, karena baik Negara maupun politik selalu melekat secara budaya. Politik itu sendiri adalah praktik budaya, di mana norma dan nilai memainkan peran penting. Oleh karena itu budaya tidak dapat secara eksklusif menjadi milik kehidupan pribadi: budaya juga merupakan bagian dari arena politik, tidak ada garis antara politik dan budaya. Ini adalah konsepsi postmodernis tentang hubungan antara kategori-kategori seperti masyarakat, seni, sains, dan politik. Postmodernisme mempermasalahkan keberadaan batas tetap antara kategori yang secara tradisional dipandang sangat terpisah. Sebagai contoh, perbedaan tajam antara sains dan politik. Ilmu pengetahuan selalu berjalan melalui

²⁶ Ibid.

mata individu yang memegang nilai-nilai dan norma-norma tertentu, dan karena itu tidak bisa tidak memihak. Kategori-kategori tidak lagi dipisahkan tetapi telah menjadi hibrida.²⁷

Upaya signifikan untuk mengatasi kontra-posisi antara hak individu dan kolektif diusulkan oleh Willy Kymlicka. Kymlicka mengapresiasi nilai-nilai liberal kebebasan memilih, otonomi pribadi dan kesetaraan. Namun, pada saat yang sama, juga menekankan pentingnya budaya dan keanggotaan budaya. Keanggotaan budaya penting dan tidak dapat dengan mudah dihilangkan dari teori liberal karena budaya memberi para anggotanya cara hidup yang bermakna dan mendefinisikan berbagai pilihan yang dapat dipilih individu. Budaya juga menyediakan lingkungan yang diperlukan untuk mengembangkan kepercayaan diri dan harga diri individu. Masyarakat yang adil harus mengakui pentingnya budaya minoritas dan memungkinkan anggotanya untuk melindungi budaya mereka terhadap praktik dan aturan mayoritas.²⁸

Namun demikian, tidak semua klaim perlindungan budaya dapat diterima secara liberal. Kymlicka membedakan antara 'perlindungan eksternal' (permintaan oleh budaya minoritas untuk melindungi keberadaan dan identitasnya yang khas dengan membatasi dampak keputusan masyarakat yang lebih besar) dan

²⁷ Ger Mennens, "Multiculturalism and Postmodernity: A Challenge to Our Political Structures," *Open Democracy*, last modified 2011, accessed January 8, 2020, <https://www.opendemocracy.net/en/multiculturalism-and-postmodernity-challenge-to-our-political-structures/%0AMulticulturalism>.

²⁸ Muhammad Nur Alam Tejo, "Dua Dayung Liberalisme Modern: John Rawls Dan Will Kymlicka," *LSF Cogito*, last modified 2018, accessed April 10, 2020, <http://lsfcogito.org/dua-dayung-liberalisme-modern-john-rawls-dan-will-kymlicka/>. Lihat juga: Verbena Ayuningsih Purbasari and Suharno, "Telaah Celah Keberagaman Warga Negara Dalam Prinsip Liberalisme," *JUPIIS : Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial* 11, no. 1 (2019): 51–52.

'pembatasan internal' (permintaan oleh budaya minoritas untuk membatasi kebebasan dasar sipil atau politik anggotanya sendiri untuk mempertahankan status quo internal, untuk mencegah fragmentasi kelompok atau untuk membedakan perbedaan internal). Klaim 'perlindungan eksternal' sepenuhnya kompatibel dengan prinsip-prinsip liberal dan harus diterima karena mereka membantu meningkatkan kebebasan individu dan keadilan sosial. Sebaliknya, tuntutan 'pembatasan internal' harus ditolak.²⁹

Jürgen Habermas, sebagaimana dikutip oleh Colombo, mencoba menjawab pertanyaan kontroversial tentang: haruskah identitas warga negara sebagai bagian dari kelompok budaya, agama atau etnis diapresiasi oleh publik? haruskah identitas kolektif di Negara konstitusional yang demokratis diakui dengan pemberian hak-hak khusus? Menurutnya, perlindungan identitas kolektif tidak selalu bertentangan dengan hak atas kebebasan individu yang setara. Dia melihat kemungkinan menghubungkan dua prinsip yang tampaknya tidak dapat didamaikan ketika perhatian pada 'substansi' kebijakan multikultural digantikan oleh konsepsi 'proseduralis' tentang hak-hak yang dengannya proses demokrasi harus melindungi otonomi pribadi dan publik secara bersamaan. Menjaga otonomi pribadi dan individu warga negara dengan hak yang sama harus berjalan seiring dengan mengaktifkan otonomi mereka sebagai warga negara yang berpartisipasi dalam kehidupan publik. Persoalannya bukan pada jenis kebijakan apa yang akan dipromosikan, tetapi berfokus pada mewujudkan 'kondisi' di mana semua warga

²⁹Colombo, "Multiculturalisms: An Overview of Multicultural Debates in Western Societies," 6.

negara dari berbagai latar budaya khas mereka, memiliki suara dalam mendefinisikan tata aturan bersama yang mengikat yang umum. Masyarakat multikultural yang adil tidak mesti ditandai dengan seperangkat norma dan kebijakan yuridis yang spesifik, nyata, dan terdefinisi secara khusus. Sebaliknya, merupakan hasil dari 'patriotisme konstitusional', sebuah perjanjian publik yang memberikan pengakuan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan bagi semua anggota masyarakat.³⁰

Gagasan untuk mendamaikan gagasan multikulturalisme dalam prinsip-prinsip liberalisme, dipaparkan oleh Seyla Benhabib. Prinsip-prinsip liberalisme dan penerimaan tradisi budaya dan agama dapat dengan mudah diatur jika tiga kondisi berikut ini terpenuhi, yaitu:

- *egalitarian reciprocity*, yakni adanya kesetaraan timbal balik. Hak sipil, politik, ekonomi, dan budaya dari anggota budaya, agama, bahasa, dan status minoritas lainnya tidak boleh lebih rendah daripada mayoritas, hanya karena status keanggotaan mereka.
- *voluntary self-ascription*. individu tidak boleh secara otomatis ditempatkan ke kelompok budaya, agama, atau bahasa berdasarkan kelahirannya. Keanggotaan kelompok individu harus memungkinkan bentuk anggapan diri dan identifikasi diri seluas-luasnya.

³⁰Ibid.

- *freedom of exit and association*, kebebasan keluar dan berserikat. Individu harus memiliki kebebasan tidak terbatas untuk memilih kelompok mana mereka berasal dan untuk berpindah dari satu ke yang lain.³¹

Inti dari gagasan Benhabib adalah adanya pengakuan terhadap keragaman budaya, tidak ada diskriminasi terhadap individu atas dasar latar belakang budayanya, tetapi setiap individu diberi kebebasan untuk memilih budaya mana yang akan dijadikan sebagai basis identitas kulturalnya, termasuk berpindah antar satu budaya ke budaya lainnya. Artinya, identitas budaya bukanlah hal yang melekat pada diri individu berdasarkan atas asal usul latar belakang ras, agama, tradisi, dan lain-lain, tetapi sebuah pilihan sadar dari individu itu sendiri, dan disinilah prinsip liberal itu terjaga. Sebagai contoh, seorang muslimah di negara sekuler berhak untuk mempertahankan identitas keislamannya, misalnya mengenakan hijab, dan tidak boleh hal itu membuatnya kehilangan hak-hak sipil sebagaimana halnya warga negara dari kelompok mayoritas. Akan tetapi, ia juga berhak untuk tidak menggunakan atribut keislamannya dan tidak boleh dipaksakan untuk itu hanya karena dia seorang muslimah. Ia memiliki kebebasan penuh sebagai individu untuk berafiliasi ke budaya mana yang ia inginkan secara suka rela. Ini merupakan gambaran bahwa multikulturalisme dapat berdamai dengan liberalisme, dan tidak perlu dipertentangkan.

Demikianlah, sebagai filsafat politik, multikulturalisme hadir mengkritisi liberalisme Barat, khususnya liberalisme klasik yang menafikan keragaman kultural

³¹Benhabib S, *The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era* (Princeton, NJ: Princeton University Press., 2002), 19–20.

demi kebebasan individual. Liberalisme klasik didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan individual, berpandangan bahwa individu bertanggung jawab atas nasib mereka sendiri dan harus diperlakukan sesuai dengan karakteristik pribadi mereka, terlepas dari keanggotaan kelompok. Di sisi lain, multikulturalisme didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan kolektif, mengakui perbedaan budaya dan mencari kesetaraan yang lebih besar antar kelompok. Multikulturalisme, pada gilirannya, merupakan tantangan bagi demokrasi liberal. Dalam demokrasi liberal, semua warga negara harus diperlakukan sama di bawah hukum dengan mengabstraksikan identitas bersama sebagai "warga negara" tanpa melihat posisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta identitas anggota masyarakat yang sebenarnya.³²

2) Multikulturalisme sebagai Ideologi (Wacana Kritis, Anti-ideologi)

Hasil review Arasaratnam terhadap 35 tahun publikasi tentang topik multikulturalisme di *IJIR (International Journal of Intercultural Relations)* menemukan adanya konsensus bahwa multikulturalisme adalah ideologi³³ dan juga pragmatis imperatif. Pada tingkat politik, kebijakan multikultural yang diformalkan memfasilitasi penegakan ideologi dalam hal-hal praktis. Multikulturalisme dapat

³² Jessica Gale and Christian Staerklé, "Multiculturalism in Classically Liberal Societies: Group Membership and Compatibility between Individual and Collective Justice," *Journal of Experimental Social Psychology* 85, no. July (2019): 1–13, <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2019.103877>.

³³ Definisi ideologi yang paling banyak diterima dalam sosiologi adalah bahwa ideologi berkaitan dengan legitimasi kekuatan kelompok sosial atau kelas yang dominan. Proses legitimasi ini melibatkan setidaknya enam strategi berbeda. Kekuatan dominan dapat melegitimasi dirinya sendiri dengan cara: 1) mempromosikan kepercayaan dan nilai-nilai yang selaras dengannya; 2) menaturalisasi dan 3) menguniversalkan kepercayaan semacam itu untuk menjadikannya sebagai bukti yang jelas dan tak terelakkan; 4) merendahkan ide-ide yang mungkin menentangnya; 5) menafikan bentuk-bentuk pemikiran saingan, mungkin tidak terucap tetapi dengan beberapa logika yang sistematis; 6) dan mengaburkan realitas sosial dengan cara-cara yang nyaman bagi dirinya sendiri. Terry Eagleton, *Introduction to Ideology, Sociocultural Studies in Education: Critical Thinking for Democracy* (London and New York: Verso, 1991), 5–8.

dipahami sebagai ideologi preskriptif dan sebagai seperangkat kebijakan publik yang bertujuan untuk menangani keragaman budaya.³⁴ Karena itu sangat penting untuk mempertimbangkan ideologi dan kebijakan multikultural secara terpisah dalam menganalisis sikap seseorang/lembaga terhadap multikulturalisme. Multikulturalisme sebagai ideologi adalah refleksi dari sistem kepercayaan yang lebih umum yang memandu pemikiran orang-orang tentang "masyarakat yang baik". Dalam konteks ini, multikulturalisme dipertentangkan dengan rasisme.³⁵

Ideologi multikulturalime mengusulkan bahwa keanggotaan kelompok tidak hanya diakui tetapi juga dihargai demi mengakomodasi keragaman dan mencapai kesetaraan.³⁶ Multikulturalisme merujuk pada penerimaan berbagai budaya dalam suatu masyarakat serta dukungan aktif dari perbedaan budaya ini baik oleh anggota mayoritas maupun anggota kelompok minoritas.³⁷ Ideologi multikulturalisme merupakan ekspektasi ideal dalam kehidupan sosial (*society-*

³⁴ Arasaratnam, "A Review of Articles on Multiculturalism in 35 Years of IJIR." Lihat juga: Gale and Staerklé, "Multiculturalism in Classically Liberal Societies: Group Membership and Compatibility between Individual and Collective Justice," 2.

³⁵ Christian Staerke, "Policy Attitudes, Ideological Values and Social Representations," *Social and Personality Psychology Compass* 3, no. 6 (2009): 1096–1112. Fasisme melihat kelemahan politik, materialisme, anomi, dan cairnya masyarakat Barat sebagai kontradiksi mendasar dalam masyarakat liberal yang hanya bisa dipecahkan oleh sebuah negara yang kuat yang menempa "rakyat" baru berdasarkan kekhasan nasional. Fasisme sebagai ideologi yang hidup telah hancur oleh Perang Dunia II. Francis Fukuyama, "Akhir Sejarah?," in *Amerika Dan Dunia: Memperdebatkan Bentuk Baru Politik Internasional (America and the World, Debating the New Shape of International Politics)*, ed. A. Zaim Rofiqi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), 14.

³⁶ Ana Urbiola et al., "Valuing Diversity in Spain and Canada: The Role of Multicultural Ideology in Intergroup Attitudes and Intentions to Reduce Inequalities," *International Journal of Intercultural Relations* 56 (2017): 25, <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2016.10.006>.

³⁷ Arasaratnam, "A Review of Articles on Multiculturalism in 35 Years of IJIR," 677.

level) yang bersesuaian dengan strategi integrasi-akulturasi pada masing-masing individu (*individual-level*).³⁸

Multikulturalisme sebagai ideologi memiliki kedekatan dengan postmodernisme³⁹ atau wacana kritis lainnya, seperti feminisme,⁴⁰ yang mencoba mendobrak universalisme yang mengakar dalam tradisi Barat modern. Multikulturalisme mengesahkan nilai dan ekspresi pluralisme budaya dan sebagaimana diwujudkan oleh identitas sosial yang kompleks secara budaya.⁴¹ Multikulturalisme dipromosikan sebagai formula ideologis dalam mewujudkan persatuan dalam keragaman.⁴²

Sejak era 1960-an dan terutama 1970-an, gerakan de-kolonisasi dan teori pasca-kolonial telah mengancam universalisme yang pada kenyataannya menyembunyikan praktik dominasi dan eksploitasi. Kritik kuat terhadap

³⁸Bryant Pui Hung Hui et al., "Facilitating Adaptation and Intercultural Contact: The Role of Integration and Multicultural Ideology in Dominant and Non-Dominant Groups," *International Journal of Intercultural Relations* 45 (2015): 70–84, <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2015.01.002>.

³⁹Peter McLaren, "Multiculturalism and the Postmodern Critique: Towards a Pedagogy Resistance and Transformation," *Cultural Studies* 7, no. 1 (1993): 118–146. Lihat juga: Norman K. Denzin, "Postmodernism," *Encyclopedia of Social Theory* (California: SAGE Publications, Inc., 2005), 581–583. Jorge Larrain, "The Postmodern Critique of Ideology," *The Sociological Review* 42, no. 2 (1994): 289–314. Craig Browne, "Postmodernism, Ideology and Rationality," *Revue Internationale de Philosophie* 251, no. 1 (2010): 79–99.

⁴⁰Meski demikian ada kekhawatiran di kalangan feminis akan bahaya relativisme politik dan moral dalam multikulturalisme. Relativisme budaya dapat membenarkan penindasan perempuan yang terus-menerus atas nama budaya dan tradisi. Tetapi, di sisi lain, ada optimisme bahwa perbedaan dapat dibangun sebagai senjata ideologis dan menjadi bagian dari strategi dominasi atau kontestasi. Floya Anthias, "Beyond Feminism and Multiculturalism: Locating Difference and the Politics of Location," *Women's Studies International Forum* 25, no. 3 (2002): 278.

⁴¹A. Gutmann, "Multiculturalism and Identity Politics: Cultural Concerns," *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 2015.

⁴²Kogila Moodley, "Canadian Multiculturalism as Ideology," *Ethnic and Racial Studies* 6, no. 3 (1983): 329.

universalisme ini, menurut Wieviorka, memberikan kontribusi teoritis orisinal dan penting dalam 'debat multikultural'.⁴³ Teori feminis, teori sosial radikal dan postmodernisme telah memainkan peran yang relevan dalam perdebatan ini. Walaupun dengan cara yang berbeda, semua perspektif teoretis ini menentang universalisme yang memberi prioritas pada situasi, variabilitas dan kontingensi sosio-historis, mereka merangsang perang terbuka atas 'kanon' dan dekonstruksi radikal dominasi—kulit putih, laki-laki—; mereka juga berkontribusi terhadap kritik akut masyarakat patriarkal dan Eurosentrisme. Di samping itu, globalisasi ekonomi dan budaya saat ini serta fenomena migrasi juga turut berkontribusi dalam meruntuhkan gagasan bahwa individu dan kelompok ditandai oleh identitas tunggal dan permanen, dan bahwa negara bangsa dapat identik dengan nilai-nilai universal.⁴⁴

Gilroy—pendiri Pusat Studi Ras dan Rasisme di University College London—melihat perbedaan dan diskriminasi kultural memiliki relasi dengan kolonialisme. Menurutnya, multikulturalisme politik selama ini cenderung melihat perbedaan kultural sebagai 'pemberian alami' dan mengabaikan faktor kekuasaan dan kekerasan yang menghasilkan perbedaan itu. Perbedaan etnis, khususnya, pada dasarnya diproduksi oleh kekuasaan dan kekerasan, yang merupakan warisan era kolonial. Multikulturalisme politik saat ini, termasuk para pengkritiknya, berfokus

⁴³Michel Wieviorka, "The Re-Enchantment of Universal Values," *Ethnic and Racial Studies* 36, no. 12 (2013): 1946–1947.

⁴⁴Colombo, "Multiculturalisms: An Overview of Multicultural Debates in Western Societies," 7.

pada perbedaan etnis dan agama, yang dianggap sebagai 'pemberian alami', mereka mengabaikan kekuatan dan kekerasan yang menghasilkan perbedaan tersebut.⁴⁵

Multikulturalisme bukan sekedar tentang pengakuan perbedaan, sebagai pengakuan murni tentang keberadaan 'orang lain' yang telah distereotipkan. Sebaliknya, ia secara kritis berfokus pada konstruksi sosial dan politik supremasi laki-laki kulit putih dan dispensasi hegemoni laki-laki kulit putih. Pertaruhan sebenarnya dalam debat multikultural bukanlah pengakuan identitas atau dukungan atas hak-hak kolektif tetapi pembukaan kedok dari dasar dominasi (kulit putih, laki-laki). Multikulturalisme, dalam hal ini, mengungkap rasisme dan melawan prasuposisi yang tak terlihat dan diterima begitu saja yang menentukan pengaturan hak, kekuasaan, dan hak istimewa.⁴⁶

Dalam perspektif historis, multikulturalisme adalah upaya untuk mendefinisikan kembali hubungan kekuasaan antara campuran dan perubahan bentuk identifikasi politik. Bukan sekedar hasil dari pertemuan antara kelompok yang berbeda dan terdefinisi dengan baik secara budaya. Multikulturalisme menyoroti karakter konstruksi sosial dari budaya dan identitas apa pun, serta menunjukkan bahwa budaya dan identitas lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sejarah dan kekuasaan daripada faktor biologi atau nasib.⁴⁷

Jika ideologi dipahami sebagai bagian dari sebuah legitimasi kekuatan kelompok sosial atau kelas dominan, sebagaimana yang disebut oleh Eagleton,

⁴⁵Lihat: Paul Gilroy, "Multiculturalism and Post-Colonial Theory," *The Oxford Handbook of Political Theory*, no. May 2018 (2008): 1–17.

⁴⁶Colombo, "Multiculturalisms: An Overview of Multicultural Debates in Western Societies," 7.

⁴⁷Ibid., 8.

maka multikulturalisme pada dasarnya adalah anti-ideologi. Kekuatan dari istilah ideologi terletak pada kemampuannya untuk merebut kekuasaan (power) yang merupakan pusat dari seluruh bentuk kehidupan sosial.⁴⁸ Di Australia, misalnya, isu etnik menjadi lokus utama perjuangan kelas, cara yang digunakan oleh kekuatan dominan untuk memecah kelas pekerja dan memperkuat jajaran konservatisme dan dominasi kelas. Dan multikulturalisme, secara sadar atau tidak, telah menjadi ideologi yang memberikan arah di kalangan kelas pekerja.⁴⁹ Multikulturalisme hadir untuk mendobrak pandangan (ideologi) tentang supremasi kulit putih, kaum laki-laki, keunggulan ras tertentu, budaya Barat serta kelompok-kelompok yang selama ini diuntungkan oleh konstruksi kekuasaan sebagai warisan dari era kolonialisme.

c. Multikulturalisme dalam praktek

Berbeda dengan multikulturalisme deskriptif yang menggambarkan realitas alami manusia yang multikultur, multikulturalisme dalam praktik adalah realitas objektif dari implementasi multikulturalisme normatif di lapangan, baik dalam bentuk kebijakan publik maupun dalam praktek kehidupan sosial di masyarakat.⁵⁰

Jon Stratton, sebagaimana dikutip oleh Ommundsen, membedakan antara "multikulturalisme resmi" sebagai ideologi yang diupayakan oleh pemerintah pembuat kebijakan, dan "multikulturalisme sehari-hari" sebagai pengalaman langsung keanekaragaman budaya. Multikulturalisme resmi didasarkan pada

⁴⁸Eagleton, *Introduction to Ideology*, 5–8.

⁴⁹A Jakubowicz, New South Wales, and Jeannie Martin, "State and Ethnicity: Multiculturalism as Ideology," *A.N.Z.J.S* 17, no. 3 (1981): 12.

⁵⁰J Clayton, "Multiculturalism as Diversity," *International Journal* (2009): 211–215.

gagasan perbedaan kelompok, sedangkan multikulturalisme sehari-hari menekankan perbedaan individu dalam kesamaan manusia secara umum.⁵¹ Kymlicka mengistilahkan perbedaan ini dengan multikulturalisme “dari bawah” versus multikulturalisme “dari atas”. Multikulturalisme “dari bawah” berkenaan dengan multikulturalisme sebagai wacana dengan dimensi politik yang dimainkan di komunitas lokal, berbeda dengan multikulturalisme “dari atas” di mana negara merekayasa multikulturalisme melalui kebijakan dan terlibat dalam pengelolaan keanekaragaman. Dalam pengertian ini multikulturalisme “dari bawah” adalah multikulturalisme sehari-hari yang berkaitan dengan pengalaman kehidupan sehari-hari dan perjuangan politik masyarakat etno-budaya dan ras.⁵²

Multikulturalisme dalam praktik sangat beragam, masing-masing negara atau komunitas mempraktekannya dengan cara yang berbeda. Namun, secara umum, ada dua teori utama atau model multikulturalisme sebagai cara mengintegrasikan budaya yang berbeda ke dalam suatu masyarakat tunggal. Teori ini sering digambarkan dengan metafora “panci peleburan (*melting pot*)” dan “mangkuk salad (*salad bowl*)”. Teori *melting pot* multikulturalisme berasumsi bahwa berbagai kelompok akan cenderung melebur bersama, meninggalkan budaya masing-masing dan akhirnya berasimilasi sepenuhnya ke dalam masyarakat yang dominan. Teori ini biasanya digunakan untuk menggambarkan asimilasi imigran ke

⁵¹Wenche Ommundsen, “Not the M-Word Again: Rhetoric and Silence in Recent Multiculturalism Debates” (Faculty of Arts, Social Sciences & Humanities, University of Wollongong, 2000), <https://ro.uow.edu.au/artspapers/309>.

⁵²Will Kymlicka, “The Three Lives of Multiculturalism,” in *Revisiting Multiculturalism in Canada: Theories, Policies and Debates*, ed. Shibao Guo and Lloyd Wong, vol. 1 (Rotterdam: Sense Publisher, 2015), 4–5.

Amerika Serikat, teori *melting pot* sering diilustrasikan oleh metafora pot peleburan pengecoran di mana unsur-unsur besi dan karbon dilebur bersama-sama untuk membuat logam, baja yang lebih kuat. Model ini dikritik karena mengabaikan keragaman yang menyebabkan orang kehilangan tradisi mereka, dan harus ditegakkan melalui kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, Undang-Undang Reorganisasi India AS tahun 1934 memaksa asimilasi hampir 350.000 orang Indian ke dalam masyarakat Amerika tanpa memperhatikan keanekaragaman warisan dan gaya hidup penduduk asli Amerika.⁵³

Selanjutnya, berbeda dengan teori *melting pot*, teori *salad bowl* lebih liberal. Teori ini menggambarkan masyarakat heterogen di mana orang hidup berdampingan tetapi mempertahankan setidaknya beberapa karakteristik unik budaya tradisional mereka. Seperti bahan salad, budaya yang berbeda disatukan, tetapi kareakterisk khas dari masing-masing unsur tetap terpelihara, bukan menyatu menjadi budaya homogen tunggal. Teori *salad bowl* menegaskan bahwa orang tidak perlu meninggalkan warisan budaya mereka untuk dianggap sebagai anggota masyarakat dominan. Di Amerika Serikat, New York City, dengan banyak komunitas etnisnya yang unik seperti: Little India, Little Odessa, dan Chinatown dianggap sebagai contoh masyarakat “mangkuk salad”.⁵⁴

⁵³Robert Longley, “What Is Multiculturalism? Definition, Theories, and Examples,” *ThoughtCo*. (New Delhi, June 2019), last modified June 2019, accessed August 1, 2020, <https://www.thoughtco.com/what-is-multiculturalism-4689285>.

⁵⁴Ibid.

Gambaran kedua model multikulturalisme ini dapat dicermati di berbagai negara, baik dalam kebijakan publik maupun dalam realitas kehidupan sosial warganya.

1) Multikulturalisme sebagai kebijakan publik

Negara yang pertama kali mengadopsi multikulturalisme sebagai sebuah kebijakan publik adalah Kanada, sebagaimana yang diumumkankannya pada tahun 1971. Kebijakan ini selanjutnya diabadikan dalam Piagam Hak dan Kebebasan (*Charter of Rights and Freedoms*) pada tahun 1982 yang disusul dengan pengesahan undang-undang tentang multikulturalisme (*Canadian Multiculturalism Act*) pada tahun 1988. Oleh karenanya, beberapa pengamat berpandangan bahwa gagasan multikulturalisme menjadi komponen kunci identitas Kanada kontemporer dan bahwa hal itu telah membantu memfasilitasi inkorporasi politik para imigran.⁵⁵

Menurut Kymlicka, ada dua tujuan utama dari kebijakan multikulturalisme Kanada diadopsi pada tahun 1971. *Pertama*, multikulturalisme adalah bagian dari tawar-menawar politik yang lebih besar yang dirancang untuk menangani krisis persatuan nasional di Kanada akibat kebangkitan nasionalisme Quebec.⁵⁶ Pada era 1960-an ada kebangkitan nasionalisme Quebec, sehingga Pemerintah federal perlu melakukan sesuatu untuk meredam pertumbuhan sentimen separatis ini. Oleh

⁵⁵Kymlicka, "The Three Lives of Multiculturalism." Stolle et al., "Religious Symbols, Multiculturalism and Policy Attitudes."

⁵⁶Quebec adalah provinsi terbesar di Kanada secara geografis, dan terbesar kedua menurut populasi setelah Ontario. Provinsi ini memiliki penduduk sejumlah 7.568.640 jiwa (Statistik Kanada, Januari 2005). Ini mencakup 24% penduduk Kanada. Dengan bahasa, budaya dan lembaga-lembaganya, Quebec merupakan suatu bangsa di dalam Kanada. Bahasa utama resmi dan satu-satunya adalah Prancis, membentuk bagian besar dari daerah francophone Amerika Utara. Quebec merupakan satu-satunya provinsi di Kanada di mana Inggris bukanlah bahasa resmi (dalam tingkat provinsi), dan salah satu dari dua provinsi Kanada di mana Prancis merupakan bahasa resmi berdasarkan Constitution Act 1982. <https://id.wikipedia.org/wiki/Quebec>

karena itu Pemerintah melakukan serangkaian reformasi untuk membuat Quebec merasa lebih betah di Kanada, termasuk meningkatkan status bahasa Prancis, sebagai bahasa resmi dan meningkatkan representasi francophones (populasi yang menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa pertama atau kedua) dalam pelayanan sipil. Secara lebih umum, pemerintah federal berusaha untuk menekankan kembali "dualitas" Kanada, yaitu, kesetaraan Inggris dan Prancis sebagai pendiri.⁵⁷

Tujuan *kedua* multikulturalisme adalah untuk menafsirkan kembali peran etnis dalam cahaya revolusi hak asasi manusia yang lebih luas. Perlu dicatat bahwa adopsi multikulturalisme pada tahun 1971 terjadi selama periode liberalisasi sosial dan politik yang paling terkonsentrasi yang pernah disaksikan Kanada. Dekade antara 1965 dan 1975 merupakan reformasi liberalisasi di hampir seluruh rangkaian kebijakan sosial, di antaranya: liberalisasi undang-undang aborsi, akses ke kontrasepsi, dan undang-undang perceraian, penghapusan hukuman mati, pelarangan diskriminasi gender dan agama, dan pencegahan kriminalisasi homoseksualitas. Era ini sering dicirikan sebagai cerminan "revolusi hak asasi manusia" di Kanada.⁵⁸

Sebelum Kanada, Inggris pada dasarnya telah melahirkan undang-undang anti diskriminasi pada tahun 1965, 1968, dan 1976 yang menandai dimulainya adopsi kebijakan multikultural oleh pemerintah. Kebijakan ini sejatinya lahir dari protes anti rasis dan gerakan akar rumput, sebuah gerakan yang kemudian

⁵⁷ Kymlicka, "The Three Lives of Multiculturalism," 18.

⁵⁸ Ibid., 19–20. Lihat juga: Patricia K. Wood and Liette Gilbert, "Multiculturalism in Canada: Accidental Discourse, Alternative Vision, Urban Practice," *International Journal of Urban and Regional Research* 29, no. 3 (2005): 679–691.

dikendalikan oleh Partai Buruh. Dari perjuangan inilah kemudian kebijakan multikultural muncul. Namun, pada tahun 1980-an pemerintah nasional yang dikendalikan oleh kelompok Konservatif tetap menentang konsep multikulturalisme.⁵⁹

Tidak seperti halnya di Kanada, kebijakan multikulturalisme di Inggris, dan negara-negara Eropa pada umumnya, menghadapi sejumlah tantangan bahkan penolakan.⁶⁰ Politisi dan partai-partai politik di seluruh Eropa menolak gagasan kebijakan multikulturalisme yang berusaha untuk memudahkan integrasi imigran, dan mendorong penggabungan imigran di antara warga pribumi. Para skeptis berpendapat bahwa multikulturalisme menciptakan segregasi, bukan integrasi, dan mendorong stereotip dan prasangka alih-alih toleransi.⁶¹

Multikulturalisme dalam praktik sangat terkait dengan persoalan imigrasi.⁶² Di Eropa, menurut Grillo, ada empat strategi kebijakan yang diterapkan terkait persoalan imigrasi, khususnya dalam empat puluh tahun terakhir. Pertama, tidak memberi ruang untuk masuk; kedua, membolehkan mereka datang tetapi sekedar sebagai burung pelintas; Ketiga, membolehkan mereka masuk tetapi harus dipastikan bahwa mereka berasimilasi; Keempat, membolehkan mereka tinggal tetapi harus ada semacam ruang lain untuk mereka. Bahkan, ada kecenderungan

⁵⁹Clayton, "Multiculturalism as Diversity," 213.

⁶⁰Mombek, Kuzhagulova, and Remizov, "Postmodernism: Theory and Practice of Multiculturalism in Europe."

⁶¹ Stolle et al., "Religious Symbols, Multiculturalism and Policy Attitudes."

⁶²Australia, Kanada dan negara-negara Eropa Utara membuktikan bahwa alasan utama multikulturalisme adalah proses imigrasi multi-skala. Sejumlah gelombang imigrasi menyebabkan gelombang besar penduduk dan latar belakang etnis, bahasa dan agama. Elena B Grishaeva, "Multiculturalism as a Central Concept of Multiethnic and Polycultural Society Studies," *Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences* 7, no. 2012 5 (2012): 917.

akhir-akhir ini kebijakan mengarah pada kategori pertama yang dikombinasikan dengan yang keempat.⁶³ Gambaran ini menunjukkan adanya resistensi negara-negara Eropa terhadap konsep multikulturalisme. Hal ini berbeda dengan Kanada dan juga Australia yang juga merupakan negara para imigran.

Australia yang secara historis merupakan negara yang memiliki ikatan kuat dengan Inggris, mulai mengadopsi kebijakan multikulturalisme sejak tahun 1970-an, meski sebelumnya Australia memberlakukan undang-undang pembatasan imigrasi 1901. Kebijakan yang lebih dikenal dengan istilah “Kebijakan Australia Putih” ini membatasi imigran non-Eropa ke Australia, sejak tahun 1901 hingga 1973. Kebijakan tersebut membatasi keragaman etnis dan budaya dari populasi imigran dan merupakan upaya untuk melestarikan identitas etno-budaya Inggris bangsa Australia. Namun, seiring berjalannya waktu, imigran Eropa, terutama Inggris tidak mampu memenuhi kebutuhan lapangan kerja, sehingga semakin banyak imigran yang datang dari benua lain.⁶⁴

Multikulturalisme pertama kali diperkenalkan sebagai dasar bagi pemukiman migran, kesejahteraan dan kebijakan sosial-budaya di Australia dalam pidato yang disampaikan oleh Menteri Imigrasi di bawah Pemerintahan Whitlam tahun 1973 berjudul *A Multi-Cultural Society for the Future*. Ini adalah pertama kalinya istilah 'masyarakat multi-budaya' digunakan dalam pernyataan kebijakan

⁶³ Ralph Grillo, *Transnational Migration and Multiculturalism Living with Difference in a Globalised World*, Revised Pr. (UK: Dept of Anthropology School of Global Studies University of Sussex, 2018), 156.

⁶⁴ Elsa Koleth, “Multiculturalism: A Review of Australian Policy Statements and Recent Debates in Australia and Overseas – Parliament of Australia,” *Parliament of Australia*, last modified 2010, accessed September 28, 2020, https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1011/11rp06.

resmi Pemerintah Australia. Kebijakan yang pro multikulturalisme ini semakin diperkuat pada masa-masa berikutnya, antara lain ditandai dengan pembentukan Human Rights and Equal Opportunity Commission (HREOC), dan pembentukan Office of Multicultural Affairs (OMA) sebagai lembaga pusat koordinasi kebijakan multikultural, pada tahun 1986.⁶⁵

Berbeda dengan Kanada, tidak ada hukum resmi yang menyatakan prinsip-prinsip inti yang menjadi landasan multikulturalisme di Inggris Raya. Meski pada pemilihan umum 1997 ada kebangkitan positif multikulturalisme, namun pada tahun 2000-an multikulturalisme ditolak secara masif baik di arena politik maupun di tengah masyarakat luas. Secara khusus, setahun setelah terpilih sebagai Perdana Menteri pada tahun 2010, David Cameron (2011) menyatakan bahwa multikulturalisme negara telah gagal dan sekarang saatnya untuk 'membalik halaman tentang kebijakan yang gagal di masa lalu'. Namun, bukti menunjukkan era pemerintah Cameron (2010-2015) tidak pernah mengubah kebijakan tentang multikulturalisme secara resmi. Dengan demikian, Inggris memperlihatkan kemunduran multikulturalisme dalam wacana politik arus utama.⁶⁶

Kebijakan tentang multikulturalisme di sejumlah negara Barat tidak jauh berbeda dengan Inggris. Keith Banting and Will Kymlicka telah melakukan penelitian tentang Indeks Kebijakan Multikulturalisme (*The Multiculturalism Policy Index*)⁶⁷

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Félix Mathieu, "The Failure of State Multiculturalism in the UK? An Analysis of the UK's Multicultural Policy for 2000–2015," *Ethnicities* 18, no. 1 (2018): 4.

⁶⁷ Indeks Kebijakan Multikulturalisme adalah proyek penelitian ilmiah yang memantau dan evolusi kebijakan multikulturalisme di seluruh negara demokrasi Barat. Proyek ini dirancang untuk memberikan informasi tentang kebijakan multikulturalisme dalam format standar yang membantu penelitian komparatif dan berkontribusi pada pemahaman hubungan negara-minoritas

pada sejumlah negara Barat. Penelitian ini menggumpulkan data dalam siklus 10 tahunan, yaitu: 1980, 1990, 2000, dan 2010. Indikator yang menjadi acuannya adalah kebijakan suatu negara terkait delapan kriteria, yaitu:

- penegasan konstitusional, legislatif atau parlementer tentang multikulturalisme, di tingkat pusat dan/atau daerah dan kota;
- adopsi multikulturalisme dalam kurikulum sekolah;
- dimasukkannya representasi etnis / sensitivitas dalam mandat media publik atau perizinan media;
- pengecualian dari kode berpakaian, baik berdasarkan undang-undang atau kasus pengadilan;
- memungkinkan kewarganegaraan ganda;
- pendanaan organisasi kelompok etnis untuk mendukung kegiatan budaya;
- pendanaan pendidikan bilingual atau pengajaran bahasa ibu;
- tindakan afirmatif bagi kelompok imigran yang kurang beruntung.⁶⁸

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adopsi multikulturalisme dalam kebijakan resmi negara masih relatif kecil. Dari 21 negara yang diteliti, hanya lima di antaranya yang sudah memiliki penegasan konstitusional, legislatif atau parlemen tentang multikulturalisme, yaitu: Australia, Belgia, Kanada, Finlandia dan Swedia. Sedangkan negara-negara yang belum mengadopsinya adalah: Austria,

⁶⁸Keith Banting and Will Kymlicka, "Is There Really a Retreat from Multiculturalism Policies? New Evidence from the Multiculturalism Policy Index," *Comparative European Politics* 11, no. 5 (2013): 583, <http://dx.doi.org/10.1057/cep.2013.12>.

Denmark, Prancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Jepang, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, Spanyol, Swiss, Inggris dan Amerika.⁶⁹

Perlu dicatat, bahwa ketiadaan kebijakan resmi tentang multikulturalisme di beberapa negara, tidak berarti bahwa negara-negara tersebut tidak menghargai perbedaan kultural. Di Jerman ada pengakuan yang meningkat atas integrasi imigran sebagai ciri permanen lanskap negara, ini terutama terjadi di tingkat kota. Di Portugal, meski tidak ada pengakuan konstitusional, tetapi ada referensi inter-kulturalisme dalam undang-undang, serta pembentukan berbagai badan kelembagaan. Demikian halnya di Spanyol, ada pengakuan atas keragaman budaya dan "inter-kulturalisme" tetapi enggan untuk menggunakan kerangka "multikulturalisme" terdapat sejumlah instrumen dan entitas kelembagaan menangani masalah yang terkait dengan integrasi, inklusi, dan antarbudaya. Sedangkan Amerika Serikat, meski tidak menegaskan multikulturalisme, tetapi memiliki Layanan Hubungan Masyarakat/Community Relations Service (CRS) pada Departemen Kehakiman yang bertindak sebagai 'juru damai' untuk konflik dan ketegangan komunitas yang timbul dari perbedaan ras, warna kulit, dan asal kebangsaan.⁷⁰

Keengganan beberapa negara untuk mengadopsi konsep multikulturalisme dalam kebijakan publik, lebih banyak disebabkan oleh adanya sejumlah problem dalam konsep multikulturalisme itu sendiri. Gamarasca, misalnya, berpadangan

⁶⁹Ibid., 585. Hasil penelitian ini juga dimuat secara terbuka dalam The MCP Index Project, "Multiculturalism Policy Index," *Queen's University*, last modified 2010, accessed October 1, 2020, <http://www.queensu.ca/mcp/>.

⁷⁰Project, "Multiculturalism Policy Index."

bahwa multikulturalisme telah gagal karena cenderung menganggap budaya yang berbeda sebagai pulau kognitif. Setiap budaya berdiri terpisah satu sama lain yang dibatasi oleh jarak kognitif. Akibatnya, multikulturalisme tidak dapat memahami apa yang sebenarnya dipertaruhkan dalam masyarakat majemuk. Meski demikian, Gamarasca juga tidak sepenuhnya setuju dengan konsep Inter-kulturalisme yang dengan tepat menekankan hubungan budaya, tetapi kadang-kadang dapat dianggap naif karena meyakini bahwa dialog yang sepenuhnya harmonis dapat muncul. Lebih lanjut, Gamarasca berpendapat bahwa pengalaman hibridisasi budaya (percampuran secara alami oleh proses interaksi) yang terjadi dalam masyarakat sipil sangat instruktif: hal itu mendorong kita untuk menemukan cara hidup bersama. Kreativitas bersama ini sebagai fitur kunci dari masyarakat demokratis, sangat dekat dengan gagasan Sokrates tentang 'pencarian bersama' di antara rekan-rekan untuk pemahaman yang sama. Kreativitas menjadikan kita mitra, karena membutuhkan kerendahan hati budaya untuk belajar dari yang lain, melalui inovasi yang sabar di ruang publik.⁷¹

2) Multikulturalisme dalam realitas sosial

Fenomena masyarakat global semakin dicirikan dengan karakteristik multikultural, hal ini disebabkan oleh gelombang imigrasi di berbagai negara yang semakin tumbuh. Imigrasi meningkatkan keragaman budaya dan akhir-akhir ini menjadi masalah yang diperdebatkan di banyak negara, seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Australia. Di negara-negara ini, keragaman telah dikaitkan dengan

⁷¹Paulo Gamarasca, "Multiculturalism or Hybridisation? Cultural Mixing And Politics," *Diversities* 15, no. 2 (2013): 67–80.

berbagai efek negative dalam kehidupan sosial, termasuk peningkatan sentimen anti-imigran, persepsi ancaman, dan sikap bermusuhan etnis. Dalam hasil penelitian Putnam di Amerika Serikat menyimpulkan bahwa imigrasi dan keragaman etnis mengurangi solidaritas sosial, kepercayaan dan altruisme, serta menurunkan sikap persahabatan.⁷² Namun, klaim ini belum banyak didukung oleh penelitian internasional. Penelitian lintas-nasional yang dilakukan Irene B. Loemraad membuktikan tidak ada pengaruh signifikan antara imigrasi dan menurunnya modal sosial, bahkan sebaliknya dapat meningkatkan beberapa bentuk partisipasi. Dampak negatif imigrasi terhadap melemahnya modal sosial hanya dapat terjadi di suatu negara (kelompok sosial) yang memiliki tingkat ketimpangan ekonomi yang tinggi, sehingga imigran dianggap sebagai ancaman terhadap ekonomi kelompok dominan.⁷³ Peningkatan keragaman tidak serta-merta menyebabkan konflik atau pengurangan modal sosial. Hasil penelitian Kalin dan Berry di Kanada, menunjukkan bahwa sikap positif terhadap kelompok etnis dari luar meningkat sama seperti sikap terhadap kelompok internal dalam lingkungan mereka.⁷⁴ Kecenderungan yang sama juga ditemukan di Selandia Baru, di mana nilai penduduk imigran umumnya meningkat dan persepsi imigran tentang diskriminasi

⁷²Robert D. Putnam, "E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-First Century The 2006 Johan Skytte Prize Lecture," *Scandinavian Political Studies* 30, no. 2 (2007): 137–174.

⁷³Irene B Loemraad, "Diversity & Social Capital 81-00," *Canadian Journal of Political Science* 2, no. 43 (2010): 319–347.

⁷⁴Rudolf Kalin and J. W. Berry, "The Social Ecology of Ethnic Attitudes in Canada.," *Canadian Journal of Behavioural Science / Revue canadienne des sciences du comportement* 14, no. 2 (1982): 97–109.

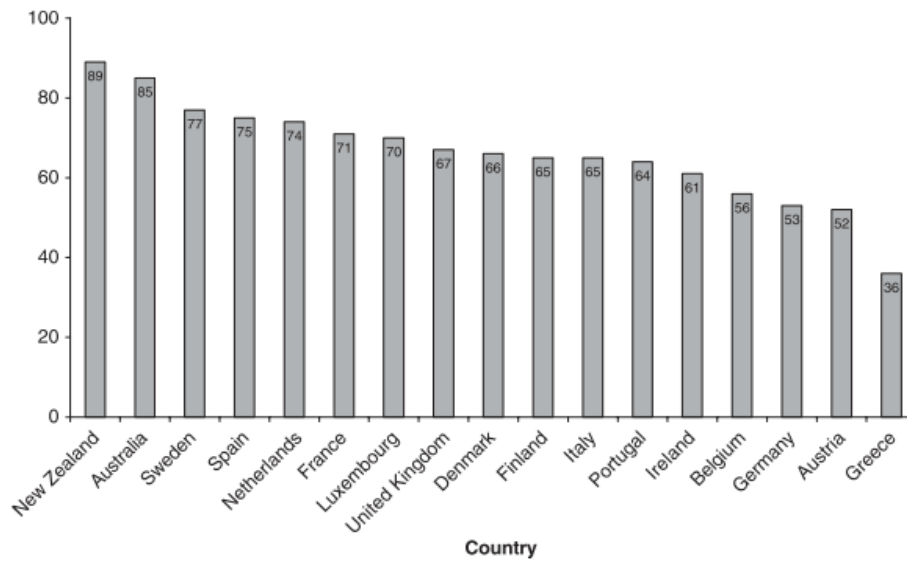
menurun sebagai respons terhadap meningkatnya kepadatan populasi imigran.⁷⁵ Dari berbagai hasil penelitian multidisiplin, John Berry berkesimpulan bahwa faktor demografis, sosial dan politik secara luas berpengaruh terhadap karakteristik pola hubungan antar budaya baik di tingkat nasional maupun lokal.⁷⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Eddy S. Ng dan Irene Bloemraad, menyimpulkan bahwa secara umum, negara-negara yang mengadopsi kebijakan multikulturalisme melaporkan hasil yang lebih positif dalam hal integrasi etnis minoritas dan toleransi di antara kelompok etnokultural. Sebaliknya, negara yang menerapkan mode asimilasi-akulturasi (mode yang menghendaki budaya pinggiran melebur ke dalam budaya *mainstream*) menunjukkan bahwa etnis minoritas dan imigran lebih miskin, serta adanya penentangan terhadap multikulturalisme dari warga kelompok dominan. Oleh karena itu, politisi dalam masyarakat asimilasi dengan cepat mencela dan menyatakan kegagalan multikulturalisme. Kenyataannya, kegagalan tersebut bisa jadi berasal dari ketidaksesuaian antara multikulturalisme sebagai ideologi dan sebagai kebijakan publik.⁷⁷

⁷⁵C Ward, A Masgoret, and M Vauclair, *Attitudes towards Immigrants and Immigrant Experiences: Predictive Models Based on Regional Characteristics*, 2011, <http://www.dol.govt.nz/publications/research/attitudes-towards-immigrants-experiences-regional/attitudes-towards-migrants.pdf>.

⁷⁶John Berry, "Comparative Analysis of Canadian Multiculturalism Policy and the Multiculturalism Policies of Other Countries," *Psychology in Russia: State of the Art* 9, no. 1 (2016): 4–23.

⁷⁷Eddy S. Ng and Irene Bloemraad, "A SWOT Analysis of Multiculturalism in Canada, Europe, Mauritius, and South Korea," *American Behavioral Scientist* 59, no. 6 (2015): 630.



Gambar 2.1. Grafik Skor Ideologi Multikulturalisme di Sejumlah Negara⁷⁸

Pada prinsipnya, multikulturalisme sebagai sebuah norma atau ideologi yang mengakui dan menghargai perbedaan kultural, dapat diterima secara luas dalam realitas sosial masyarakat di berbagai negara. Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil penelitian Ward dan Masgoret yang mengumpulkan skor tentang ideologi multikultural dari sejumlah negara, yang hasilnya tergambar pada grafik 1.

Data pada grafik 1 menunjukkan bahwa Selandia Baru, Australia, dan Swedia paling menerima ideologi multikulturalisme, sedangkan Yunani, Austria, dan Jerman paling tidak menerima. Meskipun tidak ditampilkan dalam gambar ini, 85% orang Kanada mendukung ideology multikulturalisme.⁷⁹ Dalam jajak pendapat publik yang dilakukan di 27 negara Eropa, hasilnya menunjukkan adanya

⁷⁸Colleen Ward and Anne Marie Masgoret, "Attitudes toward Immigrants, Immigration, and Multiculturalism in New Zealand: A Social Psychological Analysis," *International Migration Review* 42, no. 1 (2008): 227–248.

⁷⁹Berry, "Comparative Analysis of Canadian Multiculturalism Policy and the Multiculturalism Policies of Other Countries."

keepakatan bahwa keragaman etnis memperkaya budaya nasional (elemen keanekaragaman) dengan tingkat yang bervariasi dari 32% di Malta hingga 86% di Swedia. Sedangkan proposisi bahwa harus ada lebih banyak etnis minoritas sebagai Anggota Parlemen (elemen antar budaya) menerima tingkat dukungan yang lebih rendah, berkisar dari 17% di Bulgaria dan Siprus hingga 66% di Swedia dan Prancis.⁸⁰

Pola sikap ini, menurut Berry, menunjukkan bahwa individu lebih cenderung mendukung prinsip abstrak daripada kebijakan konkret yang dirancang untuk mencapai tujuan. Demikian pula, terdapat bukti kuat bahwa multikulturalisme menerima dukungan yang lebih besar sebagai prinsip abstrak, sementara konstruksi multikulturalisme yang lebih konkret dipandang mengancam anggota kelompok dominan.⁸¹ Tampaknya dalam praktek kehidupan riil di tengah masyarakat multikultural, nilai-nilai multikulturalisme lebih mudah terbangun dalam situasi alami, meskipun berkonsekuensi pada terjadinya asimilasi budaya antar kelompok yang terlibat yang oleh Gamarasca disebut sebagai hibridasi budaya, dibanding jika direayasa dalam bentuk kebijakan publik. Apabila dituangkan dalam bentuk kebijakan publik berpotensi dipersepsikan sebagai ancaman bagi posisi kelompok dominan.

⁸⁰European Commission, *Discrimination in the European Union, Special Eurobarometer*, 2007, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_en.pdf.

⁸¹Berry, "Comparative Analysis of Canadian Multiculturalism Policy and the Multiculturalism Policies of Other Countries," 8–9.

3. Kritik atas Multikulturalisme

Multikulturalisme, sebagai sebuah filsafat politik, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya berhadapan dengan filsafat liberal universalisme yang menjunjung tinggi kebebasan individu dalam mewujudkan semangat keadilan dan kesetaraan. Multikulturalisme dipandang berpotensi melahirkan politisasi identitas kelompok budaya yang justru dapat menghambat proses integrasi minoritas.⁸² Kebijakan multikulturalisme cenderung mengarah kepada fragmentasi daripada integrasi, sehingga oleh sebagian kalangan, multikulturalisme justru dianggap sebagai masalah dan bukan solusi. Bagi kritikus multikulturalisme, yang dibutuhkan dalam menata perbedaan yang mengancam keutuhan bangsa adalah identitas nasional yang lebih kuat dan lebih koheren.⁸³

Eagan mengemukakan dua keberatan utama terhadap multikulturalisme. *Pertama*, multikulturalisme mengistimewakan kebaikan kelompok di atas kepentingan bersama, dengan demikian berpotensi mengikis kepentingan umum demi kepentingan minoritas. *Kedua*, multikulturalisme dapat menyebabkan persaingan antara kelompok budaya untuk mendapatkan pengakuan dan hal ini justru semakin memperkuat dominasi budaya dominan. Fokus pada identitas kelompok budaya dapat mengurangi kapasitas gerakan politik koalisi yang mungkin berkembang melintasi perbedaan.⁸⁴

⁸² Loobuyck, "Liberal Multiculturalism," 109.

⁸³ Clayton, "Multiculturalism as Diversity," 214.

⁸⁴ Eagan, "Multiculturalism."

Schmidt, juga mengkritisi para multikulturalis—dalam konteks Amerika—yang sangat antusias mempromosikan kontribusi semua budaya, ingin melestarikan komunitas etnis dengan mengorbankan budaya dan identitas nasional; mengklaim menghormati semua budaya, tetapi mengabaikan kontribusi orang-orang dari etnis Eropa; mengklaim tertarik pada budaya non-Eropa tetapi menampilkannya sebagai homogen dan tanpa cacat, sebagai unit yang lebih sederhana daripada sebagai entitas yang kompleks dan beraneka ragam; memperlakukan ras sebagai budaya dan mengubah sub-budaya menjadi status budaya; mengangkat budaya non-Barat menjadi status khusus dan sakral melampaui kritik.⁸⁵

Kritik lain terhadap multikulturalisme juga muncul dari analisis terhadap relasi kekuasaan dan keadilan ekonomi. Multikulturalisme dipandang sebagai bentuk "politik pengakuan" bukannya "politik redistribusi." Politik pengakuan menantang ketidaksetaraan status dan solusi yang dicari adalah perubahan budaya dan simbolik, sedangkan politik redistribusi menantang ketidaksetaraan dan eksploitasi ekonomi dan solusi yang dicari adalah restrukturisasi ekonomi.⁸⁶ Tidak heran jika kemudian Bakerman menilai bahwa multikulturalisme tidak memberikan solusi inovatif apa pun terhadap ketimpangan melainkan menawarkan ruang alternatif di mana toleransi terhadap budaya orang lain disarankan sebagai

⁸⁵ Cyril Levitt, "The Menace of Multiculturalism : Trojan Horse in America Reby by Alvin J. Schmidt View (Book Review)," *The Canadian Journal of Sociology / Cahiers canadiens de sociologie* 24, no. 2 (2019): 321.

⁸⁶ Sarah Song, "Multiculturalism," *The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2017 Edition)*, 2017, accessed October 28, 2020, <https://plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/multiculturalism/>.

pengganti kesetaraan dan bahkan sebagai pembenaran atas ketidaksetaraan.⁸⁷ Dengan demikian, multikulturalisme hanya akan melahirkan kesetaraan kultural yang sifatnya simbolik dalam bentuk kebebasan mengekspresikan nilai-nilai tradisi pada masing-masing kelompok budaya, sementara hal tersebut tidak berimplikasi signifikan pada tingkat kesetaraan ekonomi. Sehingga eksploitasi ekonomi oleh kelompok budaya dominan masih sangat mungkin terjadi.

Kalangan feminis juga mengajukan keberatan terhadap konsep multikulturalisme, bahwa secara normatif multikulturalisme dipandang membela kesetaraan jender, tapi pada saat yang sama budaya patriarki yang melekat dalam kelompok budaya tertentu justru membuka peluang pada penindasan kaum perempuan atas nama tradisi dan budaya.⁸⁸

Demikianlah, multikulturalisme menyimpan sejumlah ambivalensi dalam dirinya, terutama jika diterapkan sebagai sebuah kebijakan publik. Itulah sebabnya, di sejumlah negara lebih memilih model inter-kulturalisme dan asimilasi dibanding multikulturalisme dalam menata keragaman kultural di ruang publik.⁸⁹ Cal Thomas, seorang jurnalis Amerika, dalam artikelnya yang berjudul “*The Failure of Multiculturalism*”, memaparkan bahwa apa yang kita saksikan adalah kehancuran total dan kegagalan multikulturalisme. Multikulturalisme—yang didefinisikan sebagai “pelestarian berbagai budaya atau identitas budaya dalam masyarakat yang

⁸⁷Zvi Bekerman, “Hidden Dangers in Multicultural Discourse,” *Race Equality Teaching* 21, no. 3 (2016): 38.

⁸⁸Anthias, “Beyond Feminism and Multiculturalism: Locating Difference and the Politics of Location.”

⁸⁹Diskursus tentang hal ini dapat dilihat antara lain dalam: Thomas Sealy, “Multiculturalism, Interculturalism, ‘Multiculture’ and Super-Diversity: Of Zombies, Shadows and Other Ways of Being,” *Ethnicities* 18, no. 5 (October 1, 2018): 1–25.

bersatu, sebagai negara atau bangsa"—mengandung kontradiksi yang mencolok. Suatu masyarakat tidak dapat dipersatukan jika ia melestarikan budaya dan identitas budaya yang berbeda di dalamnya.⁹⁰

B. Pendidikan Multikultural: Multikulturalisme dalam Praktik

Berdasarkan tipologi multikulturalisme sebagaimana telah dipaparkan, Pendidikan multikultural adalah salah satu bagian dari multikulturalisme dalam praktik, baik sebagai bagian dari kebijakan publik maupun sebagai wujud realitas sosial. Pendidikan multikultural sebagai bagian dari kebijakan publik antara lain diwujudkan dalam bentuk kurikulum Pendidikan multikultural yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang (negara) atau yang diadopsi oleh lembaga-lembaga pendidikan swasta sehingga dapat dikategorikan sebagai bagian dari realitas sosial.

1. Pengertian dan Sejarah

a. Pengertian pendidikan multikultural

Pendidikan multikultural adalah sebuah ide yang menyatakan bahwa semua siswa, terlepas dari kelompok mana mereka berasal—terkait dengan jenis kelamin, etnis, ras, budaya, bahasa, kelas sosial, agama, atau kekhususan—harus diperlakukan setara dalam pendidikan di sekolah. Pendidikan multikultural juga merupakan upaya reformasi yang dirancang untuk melakukan transformasi sekolah sehingga siswa dari beragam agama, budaya, bahasa, dan kelompok etnis akan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan di sekolah. Pendidikan multikultural memandang sekolah sebagai sistem sosial yang terdiri dari bagian dan

⁹⁰Cal Thomas, "The Failure of Multiculturalism," *WORLD*, 2016, https://world.wng.org/2016/02/the_failure_of_multiculturalism. Lihat juga: Song, "Multiculturalism."

variabel yang saling terkait. Oleh karena itu, untuk mereformasi sekolah dalam mewujudkan kesetaraan pendidikan, semua komponen utama sekolah harus diubah secara substansial. Fokus pada satu variabel di sekolah, seperti kurikulum formal, tidak akan mewujudkan pendidikan multikultural.⁹¹

b. Sejarah pendidikan multikultural

Tidak mudah untuk menetapkan garis waktu yang tepat kapan pendidikan multikultural itu ada. Rentetan peristiwa sejarah yang tersebar di seluruh Amerika Serikat (dan di seluruh dunia), dapat dikaitkan dengan kelahiran pendidikan multikultural. Sebagai contoh, dapat dikatakan bahwa pendidikan multikultural lahir ketika orang-orang Afrika-Amerika yang diperbudak mulai mendidik diri mereka sendiri tentang sejarah mereka di Afrika dan Amerika Serikat dan bagaimana peran dan partisipasi mereka dalam sejarah ini, serta identitas ras mereka menentukan perlakuan mereka di Masyarakat AS. Pendidikan multikultural juga dimulai ketika anggota suku asli Amerika mulai mendidik diri mereka sendiri tentang bagaimana melawan, bertahan hidup, dan bergaul dengan penjajah kulit putih Eropa dan kelompok budaya lainnya, termasuk suku asli Amerika lainnya. Atau, pendidikan multikultural dimulai ketika orang Amerika keturunan Asia, terutama orang Cina, berkomunikasi dengan keluarga mereka di tanah air mereka tentang kehidupan di Amerika Serikat, dan belajar untuk melawan, bertahan hidup, dan bergaul dengan orang Amerika kulit putih, dan orang kulit berwarna lainnya. Demikian pula, pendidikan multikultural dimulai untuk orang Meksiko di Barat

⁹¹James A. Banks, "Multicultural Education: Characteristics and Goals," in *Multicultural Education Issues and Perspectives*, ed. James A. Banks, Frederick Erickson, and Cherry A. McGee Banks (USA: John Wiley & Sons, Inc. All, 2010), 25.

Daya (misalnya Arizona, New Mexico, Texas) ketika mereka terlibat dalam berbagai interaksi dengan penduduk asli Amerika, Afrika Amerika, Asia Amerika, dan kulit putih Amerika. Dalam banyak hal, pendidikan multikultural mulai berkembang di Amerika Serikat selama tahun-tahun awal negara itu ketika orang-orang yang tinggal di sini mulai berinteraksi dengan orang-orang di luar kelompok budaya terdekat mereka.⁹²

Pendidikan multikultural pada dasarnya bertransformasi dari pendidikan inter-kultural—yang dicirikan dengan pendidikan yang memberi ruang bagi peserta didik untuk mengenal budaya lain—menjadi pendidikan multikultural yang mengakui kesetaraan kultural dalam pengertian yang lebih luas. Perkembangan evolusioner pendidikan multikultural digambarkan oleh Carl A. Grant ke dalam empat periode, yaitu:

- a. Periode pertama, era 1930-an sampai 1940-an. Periode ini ditandai dengan gerakan antar budaya (*intercultural movement*) yang disebabkan oleh gelombang imigrasi di Amerika Serikat, dan khususnya dari Eropa Barat. Pada periode ini konsep integrasi yang digunakan adalah asimilasi, yaitu Amerikanisasi penuh yang didasarkan pada nilai-nilai “kebebasan”, “kesetaraan”, dan “keadilan”. Saat itu gerakan antarbudaya awalnya ditujukan untuk mengenal budaya pendatang. Secara umum, sistem pendidikan ditujukan untuk membentuk cara pandang monokultural bagi generasi yang akan datang.

⁹² Carl A. Grant, “The Evolution of Multicultural Education in the United States : A Journey for Human Rights & Social Justice,” *The Evolution of multicultural education in the United States : A journey for human rights & social justice* (2008): 2–3.

Namun, tidak semua pendatang ingin berasimilasi yang menyebabkan masalah tertentu dan membutuhkan upaya luar biasa dari pendidik.⁹³

- b. Periode kedua, era 1940-an dan 1950-an. Periode ini ditandai dengan lahirnya gerakan pendidikan antar budaya (*intercultural educational movement*). Masyarakat menghadapi ketegangan rasial yang disebabkan oleh migrasi penduduk pedesaan, kebanyakan Afrika-Amerika. Organisasi publik bermunculan untuk melindungi hak-hak orang Afrika-Amerika. Pola sosial dan psikologis yang terungkap dari konflik antar kelompok menghendaki pengembangan kurikulum yang mempromosikan toleransi antar kelompok dan penyelesaian konflik secara damai serta program yang dirancang untuk mencegah ketegangan rasial. Kurikulum difokuskan pada empat masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial yang berpengaruh dalam pembentukan stereotip dan prasangka, yaitu: 1) perbedaan gaya hidup keluarga; 2) perbedaan gaya hidup komunitas; 3) pengabaian budaya Amerika; dan 4) pengembangan hubungan damai antar individu.⁹⁴
- c. Periode ketiga, era pertengahan 1950-an hingga pertengahan 1960-an. Periode ini ditandai dengan lahirnya Gerakan Hak Sipil (*Civil Rights Movement*) yang bertujuan menghapus hukum dan tradisi berdasarkan ras. Perubahan signifikan dibuat di badan legislatif AS. Akibatnya, gagasan persamaan yuridis untuk semua warga negara Amerika dari ras apa pun berakar dalam kesadaran sosial. Meski gerakan tersebut gagal mengatasi diskriminasi

⁹³ Ibid., 3–4.

⁹⁴ Ibid., 4–5.

seungguhnya, pendidikan multikultural menjadi alat sosial yang ampuh untuk membentuk masyarakat yang setara.⁹⁵

- d. Periode keempat (terakhir), era 1960-an sampai 1970-an yang ditandai dengan gerakan studi etnik. Gerakan Studi Etnik yang tumbuh dari Gerakan Hak Sipil ini merupakan bagian yang berkontribusi pada perkembangan pendidikan multikultural. Selama gerakan ini, orang Afrika-Amerika dan anggota dari banyak kelompok kulit berwarna lainnya menuntut kesetaraan dan kesetaraan dalam kebijakan dan praktik perumahan dan sekolah. Di beberapa daerah perkotaan besar seperti Detroit dan Milwaukee orang tua, anggota masyarakat, dan guru menuntut agar kebijakan dan praktik pendidikan rasis *de facto* seperti segregasi dihapuskan, tetapi dalam banyak contoh praktik *de facto* digunakan untuk menjaga desegregasi tetap di tempatnya.⁹⁶

Demikianlah, bahwa pendidikan multikultural tidak lahir secara instan, tetapi melalui proses yang panjang, berevolusi dari pendidikan inter-kultural menjadi pendidikan multikultural. Selama periode yang terakhir (1960-1970-an), menurut Sultanova, terjadi perubahan sosial yang signifikan di kalangan masyarakat Amerika. Orang Afrika-Amerika dan kelompok etnis lainnya menolak asimilasi dan mencoba melestarikan identitas dan warisan budaya mereka. Mereka menuntut agar budaya mereka dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah, perguruan tinggi dan universitas untuk memastikan internalisasi nilai yang seimbang pada peserta didik antara budaya mayoritas dengan budaya mereka

⁹⁵ Ibid., 7.

⁹⁶ Ibid., 7–8.

sendiri. Oleh karena itu, warisan budaya USA memerlukan pertimbangan ulang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat yang multikultural.⁹⁷

Sebagian ahli memilih era terakhir dalam periodisasi Carl A. Grant, yakni 1960-1970-an, sebagai titik awal dalam sejarah kelahiran pendidikan multikulturalisme. Paul C Gorski, misalnya, dalam tulisannya *A Brief History of Multicultural Education*, menegaskan bahwa Pendidikan multikultural berakar pada gerakan hak-hak sipil dari berbagai kelompok yang secara historis tertindas, terutama aksi sosial orang-orang Afrika-Amerika dan orang-orang non kulit putih lainnya yang menentang praktik diskriminatif di lembaga publik selama era perjuangan hak-hak sipil tahun 1960-an. Salah satu lembaga publik yang menjadi sorotan mereka adalah lembaga pendidikan, yang dianggap paling diskriminatif. Para aktivis, tokoh masyarakat, dan orang tua menyerukan reformasi kurikulum dan menuntut peninjauan ulang praktik perekrutan sehingga selaras dengan keragaman ras di negara tersebut.⁹⁸ Pandangan senada juga dipaparkan oleh James A. Bank, bahwa Pendidikan multikultural tumbuh dari gejolak Gerakan Hak Sipil tahun 1960-an. Selama dekade ini, orang Afrika-Amerika memulai pencarian hak-hak mereka yang belum pernah terjadi sebelumnya di Amerika Serikat. Tujuan utama Gerakan Hak Sipil tahun 1960-an adalah menghapus diskriminasi dalam akomodasi publik, perumahan, pekerjaan, dan pendidikan. Konsekuensi dari Gerakan Hak Sipil memiliki pengaruh yang signifikan pada lembaga pendidikan karena

⁹⁷Leila Sultanova, "Origin and Development of Multicultural Education in the USA," *Comparative Professional Pedagogy* 6, no. 2 (2016): 52.

⁹⁸Paul C Gorski, "A Brief History of Multicultural Education," *An EdChange Project*, last modified 1999, accessed October 4, 2020, http://www.edchange.org/multicultural/papers/edchange_history.html.

kelompok etnis—pertama Afrika Amerika dan kemudian kelompok lain—menuntut agar sekolah dan lembaga pendidikan lainnya mereformasi kurikulum sehingga dapat mencerminkan pengalaman, sejarah, budaya, dan perspektif mereka. Kelompok etnis juga menuntut agar sekolah mempekerjakan lebih banyak guru dan administrator non kulit putih sehingga anak-anak mereka akan memiliki teladan yang lebih baik. Kelompok etnis mendorong kontrol komunitas atas sekolah di lingkungan mereka dan untuk revisi buku teks yang mencerminkan keragaman masyarakat di Amerika Serikat.⁹⁹

Jika Kanada dianggap sebagai negara pertama yang mengadopsi multikulturalisme sebagai kebijakan resmi, termasuk dalam kebijakan pendidikannya pada tahun 1971,¹⁰⁰ maka era 1960-1970-an dapat dijadikan acuan sebagai titik awal dalam sejarah lahirnya pendidikan multikultural secara formal. Hal ini sejalan dengan pandangan Paul C. Gorski dan James A. Bank, atau periode akhir dari perodesasi transformasi pendidikan multikultural Carl A. Grant. Periode ini juga merupakan periode ketika wacana multikulturalisme sedang meluas diperbincangkan dan diperdebatkan di dunia Barat.¹⁰¹

⁹⁹ Banks, "Multicultural Education: Characteristics and Goals," 5–6.

¹⁰⁰ Kymlicka, "The Three Lives of Multiculturalism," 18.

¹⁰¹ Mohammed Abdul Aziz, "The Origins, History and Development of Multiculturalism in the UK," in *Debating Multiculturalism I*, ed. Max Farrar, Simon Robinson, and Omer Sener (London: Dialogue Society, 2012), 59.

2. Prinsip dasar dan ruang lingkup pendidikan multikultural

a. Prinsip dasar pendidikan multikultural

Pendidikan Multikultural secara prinsip berbasis pada penghormatan dan penghargaan terhadap harkat manusia. Menurut Bank, manusia—dari sudut pandang filsafat, sains maupun agama—dapat disederhanakan sebagai makhluk biologis yang secara inheren spiritual serta dikonstruksi secara kultural. Dengan demikian, menjadi manusia (*human being*) akan melibatkan atribut biologis, spiritual, dan budaya sebagai satu unit fungsional, yang disebut kepribadian, yang mampu menjadi kreatif, reflektif, dan mudah bergaul (bersosialisasi).¹⁰² Atribut biologis tampil dalam bentuk keragaman, misalnya, warna kulit, postur tubuh, jenis kelamin. Atribut spiritual hadir dalam keragaman keyakinan, ideologi, dan agama. Sedangkan atribut kultural dapat disaksikan dalam fenomena keragaman bahasa, tradisi, status sosial, dan lain-lain. Pada titik inilah pendekatan multikulturalisme diperlukan dalam proses pendidikan, karena setiap anak didik adalah individu yang memiliki latar belakang yang beragam, baik dari aspek biologis, spritual maupun budaya, yang menjadi unsur utama dalam pembentukan kepribadiannya.

Peran guru bukanlah sebagai polisi budaya, tetapi seorang pendidik, teman, dan sekutu bagi pembelajar yang sedang dalam perjalanan menuju pengembangan dan realisasi diri. Hal yang pertama sekali perlu dilakukan dalam mendidik siswa dari berbagai latar belakang adalah guru harus berdamai dengan identitas

¹⁰²Chinaka Samuel DomNwachukwu, *An Introduction to Multicultural Education* (Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2008), 2–3.

kemanusiaan dan budaya mereka, dan selanjutnya melangkah untuk menegaskan kemanusiaan para siswa di kelasnya, serta menegaskan identitas budaya individu.¹⁰³

Prinsip pendidikan multikultural adalah: (1) demokrasi, kesetaraan dan keadilan; (2) berorientasi pada kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian, serta (3) mengembangkan sikap mengakui, menerima dan menghargai keragaman budaya.¹⁰⁴

b. Tujuan dan Ruang Lingkup Pendidikan Multikultural

Ada empat *core values* pendidikan multikultural, yaitu apresiasi terhadap fakta pluralitas budaya dalam masyarakat, pengakuan terhadap harkat dan hak asasi manusia, pengembangan tanggung jawab masyarakat dunia, dan pengembangan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi.¹⁰⁵

Fokus pendidikan multikultural mencakup: ide atau konsep, gerakan reformasi pendidikan, dan proses. Pendidikan multikultural menggabungkan gagasan bahwa semua siswa—terlepas dari gender, kelas sosial, dan karakteristik etnis, rasial, atau budaya mereka—harus memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah.¹⁰⁶

¹⁰³Lihat: Ibid., 7. Untuk mencapai tujuan ini, salah satu latihan yang digunakan oleh James A. Bank adalah proyek otobiografi budaya berjudul, “Siapakah Saya dalam Kebudayaan Saya?” Dalam proyek ini, para siswa meluangkan waktu untuk meneliti warisan budaya mereka sendiri dan juga lainnya, pengaruh budaya yang membentuk mereka. Mereka menulis otobiografi mereka dan datang ke kelas dengannya, bersama dengan artefak penting yang mewakili budaya mereka.

¹⁰⁴ Aly Abdullah, *Pendidikan Islam Multikultural Di Pesantren: Telaah Terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Surakarta* (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2011), 109.

¹⁰⁵H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan Dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 210.

¹⁰⁶Banks, “Multicultural Education: Characteristics and Goals,” 3.

Tujuan utama pendidikan multikultural adalah untuk membantu siswa mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk berfungsi dalam mikrokultur mereka sendiri, makrokultur nasional, mikrokultur lainnya, dan komunitas global.¹⁰⁷ Pendidikan multikultural lebih lanjut bertujuan untuk menghilangkan stereotip budaya dan mengurangi diskriminasi yang dihadapi beberapa kelompok minoritas di sekolah dan di masyarakat yang lebih luas.¹⁰⁸

3. Dimensi Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural bukan sekedar pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman kultural, tetapi lebih dari itu pendidikan kultural terkait dengan beragam dimensi yang saling terkait sebagai suatu sistem. Adapun dimensi pendidikan multikultural, meliputi: integrasi materi, proses konstruksi pengetahuan, pengurangan prasangka, pedagogi kesetaraan, serta pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial.¹⁰⁹

a. Integrasi materi

Praktik pendidikan multikultural di ruang kelas mengharuskan adanya proses integrasi nilai-nilai multikultural dalam setiap materi pembelajaran. Proses integrasi ini dapat dilakukan oleh guru, misalnya, dengan menggunakan contoh dan konten dari berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep, prinsip, generalisasi, dan teori utama di bidang subjek atau disiplin mereka. Penambahan

¹⁰⁷Ibid., 25.

¹⁰⁸Faisal Ali and Carl Bagley, "Islamic Education and Multiculturalism: Engaging with the Canadian Experience," *Journal of Contemporary Issues in Education* 8, no. 2007 (2013): 24 (accessed April 01, 2018).

¹⁰⁹Banks, "Multicultural Education: Characteristics and Goals," 20–23.

konten etnis dan budaya ke dalam area subjek harus logis, bukan dibuat-buat atau dipaksakan. Tentu saja dalam hal ini ada materi atau mata pelajaran tertentu yang memiliki peluang lebih banyak dari yang lain. Misalnya, dalam bidang ilmu-ilmu sosial humaniora, peluang integrasi muatan multikultural lebih besar dibanding pada ilmu-ilmu eksakta.¹¹⁰

Pada dimensi ini, tidak bisa dihindari, multikulturalisme memainkan peran sebagai norma atau ideologi yang nilai-nilainya diinternalisasikan melalui proses pendidikan. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai humanisme yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan persamaan hak setiap individu tanpa melihat latar belakang agama, suku, ras, jenis kelamin, serta atribut kultural lainnya. Bahkan bukan hanya sebatas kesetaraan individu, tetapi juga kesetaraan kultural. Pendidikan yang berbasis pada ideologi multikulturalisme memberi peluang yang sama pada setiap individu untuk mengekspos ide, konsep, paradigma, dan atribut kulturalnya masing-masing, dan tidak dituntut untuk melebur dalam budaya dominan (mayoritas).

b. Proses konstruksi pengetahuan

Proses konstruksi pengetahuan berkaitan dengan sejauh mana guru membantu siswa untuk memahami, menyelidiki, dan menentukan bagaimana asumsi budaya, kerangka acuan, perspektif, dan bias dalam suatu disiplin mempengaruhi konstruksi pengetahuan. Peserta didik dapat menganalisis proses

¹¹⁰Ibid., 22. James A. Banks, "Multiculturalism's Five Dimensions," *NEA Today*, last modified 1998, accessed October 21, 2020, <http://www.learner.org/workshops/socialstudies/pdf/session3/3.Multiculturalism.pdf>. Lihat juga: James A. Banks, "Approaches to Multicultural Curriculum Reform," *Trotter Review* 3, no. 3 (1989): 17–19, accessed October 25, 2020, http://scholarworks.umb.edu/trotter_review/vol3/iss3/5.

konstruksi pengetahuan dalam sains dengan mempelajari bagaimana rasisme telah diabadikan dalam sains oleh teori kecerdasan genetik, Darwinisme, dan egenetika. Rasisme ilmiah berkembang dan berpengaruh pada abad ke-19 dan ke-20.¹¹¹

Lebih lanjut, Bank memandang perlu untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang jenis-jenis pengetahuan agar mereka lebih memahami keragaman perspektif kultural, serta dapat membangun interpretasinya sendiri terhadap realitas. Dalam hal ini, ada lima jenis ilmu pengetahuan, menurut Bank, yaitu: *pertama*, pengetahuan personal/kultural, yaitu konsepsi, eksplanasi dan interpretasi yang diperoleh dari pengalaman sehari-hari dalam lingkungan keluarga dan komunitas kultural. *Kedua*, pengetahuan populer, yaitu: konsepsi, fakta, eksplanasi, dan interpretasi yang terlembagakan melalui media massa, atau institusi lain yang merupakan bagian dari budaya populer. *Ketiga*, pengetahuan akademis *mainstream*, yaitu: konsep, paradigma, teori dan eksplanasi yang merupakan tradisi Barat-sentris dalam bidang ilmu pengetahuan sosial humaniora. *Keempat*, pengetahuan akademis transformatif, yaitu: fakta, konsep paradigm, teori dan eksplanasi yang menantang pengetahuan akademis *mainstream* dan mengembangkan revisi substantif terhadap kemapaan sains Barat baik dari segi konten maupun metodologinya. *Kelima*, pengetahuan sekolah, yaitu: fakta, konsep, generalisasi, teori dan interperetasi yang disajikan di buku-buku pelajaran. Kelima jenis pengetahuan ini memberikan gambaran tetapi tidak mencerminkan realitas dalam kompleksitasnya secara utuh. Kategorisasi pengetahuan tersebut hanyalah alat konseptualisasi yang dapat digunakan untuk membangun kerangka pikir

¹¹¹Banks, "Multicultural Education: Characteristics and Goals," 20–21.

pembelajaran multikultural. Meskipun secara konseptual pengetahuan-pengetahuan tersebut dapat dikategorisasikan ke dalam beragam jenis, tetapi dalam realitas semuanya saling terkait dan *over lap* dengan cara yang dinamis.¹¹²

Tipologi pengetahuan yang dipaparkan Bank di atas, menunjukkan kuatnya corak postmodernisme dalam argumentasinya.¹¹³ Seperti diketahui, postmodernisme antara lain dicirikan dengan kritiknya terhadap universalisme pengetahuan Barat.¹¹⁴ Bank memberikan perhatian serius terhadap dimensi konstruksi pengetahuan sebagai bagian penting dalam pendidikan multikultural. Hal ini mengisyaratkan bahwa persoalan ketidakadilan kultural—kulit putih dan kulit hitam, ras unggul, kelas sosial, dll—tidak terlepas dari persepsi kognitif yang diproduksi oleh konstruksi pengetahuan seseorang. Dalam konteks ini, pandangan Bank didukung oleh teori Karl Mannheim tentang relasi pengetahuan dan asal-usul sosial yang melatarinya,¹¹⁵ demikian pula teori Gilroy, yang menegaskan bahwa ketidaksetaraan kultural lebih disebabkan oleh faktor kekuasaan, sebagai warisan era kolonial.¹¹⁶

¹¹²James A. Banks, "The Canon Debate, Knowledge Construction, and Multicultural Education," *Educational Researcher* 22, no. 5 (1993): 6.

¹¹³ Menurut Powers, Banks awalnya berusaha untuk membingkai pendidikan multikultural dalam "paradigma empiris" ilmu Barat modern. Tetapi pada awal 1990-an Banks mulai merangkul postmodernisme dan penolakannya terhadap rasionalisme dan empirisme yang menjadi dasar ilmu sosial modern. Selengkapnya lihat: Thomas F Powers, "Postmodernism and Jame A. Bank's Multikulturalism: The Limits of Intellectual History," *Educational Theory* 52, no. 2 (2002): 209–221.

¹¹⁴Browne, "Postmodernism, Ideology and Rationality." Lihat juga: McLaren, "Multiculturalism and the Postmodern Critique: Towards a Pedagogy Resistance and Transformation."

¹¹⁵Harvey Goldman, "From Social Theory to Sociology of Knowledge and Back: Karl Mannheim and the Sociology of Intellectual Knowledge Production," *Sociological Theory* 12, no. 3 (1994): 266–278.

¹¹⁶Gilroy, "Multiculturalism and Post-Colonial Theory."

Signifikansi proses konstruksi pengetahuan dalam pendidikan multikultural dijelaskan lebih lanjut oleh Bank bahwa pengetahuan personal atau kultural akan menjadi masalah ketika berbenturan dengan validasi pengetahuan saintifik (Barat), berseberangan dengan kultur sekolah, atau bertentangan dengan pengetahuan akademis *mainstream*. Banyak pengetahuan tentang kelompok (budaya) “luar” yang diperoleh dalam keluarga atau komunitas kultural, mengandung kesalahpahaman, *stereotype* dan kebenaran parsial. Sebagian anak-anak di Amerika Serikat bersosialisasi dalam komunitas yang terpisah oleh batasan-batasan ras, etnis, dan kelas sosial. Akibatnya, anak-anak Amerika tidak memiliki kesempatan untuk belajar secara langsung (dari sumber aslinya) tentang ras, etnik dan kelas sosial yang berbeda dengan mereka.¹¹⁷

Dengan demikian, pendidikan multikultural sejatinya memberikan kesempatan yang luas bagi peserta didik untuk mengenal pengetahuan dari kelompok budaya “luar” secara langsung, bukan dari sumber lain yang sudah terdistorsi, atau dari kaca mata budaya *mainstream* (Barat) yang mengandung potensi bias. Pendidikan multikultural akan melahirkan cara pandang bahwa pengetahuan itu tidak tunggal tetapi beragam dan tidak terlepas dari situasi sosial budaya yang melahirkannya.

c. Pengurangan prasangka

Pengurangan prasangka sebagai salah satu dimensi pendidikan multikultural dimaksudkan agar proses dan aktivitas pendidikan diorientasikan untuk membantu peserta didik mengembangkan sikap positif terhadap kelompok ras, etnis, dan

¹¹⁷ Banks, “The Canon Debate, Knowledge Construction, and Multicultural Education,” 7.

budaya yang berbeda. Gagasan ini dikemukakan oleh Bank dengan berpijak pada hasil penelitian yang menunjukkan banyaknya anak-anak yang datang ke sekolah dengan membawa pandangan negatif serta kesalahpahaman terhadap kelompok ras dan etnis yang berbeda dengan mereka. Namun demikian, penelitian juga menunjukkan bahwa dengan mempersiapkan bahan ajar yang memuat konten positif tentang kelompok ras dan etnis, dapat membantu peserta didik mengembangkan sikap positif mereka, jika dilakukan secara kontinyu dan konsisten.¹¹⁸

Selanjutnya, Bank merekomendasikan hipotesis kontak antar-kelompok yang digagas oleh Allport (*Allport's Intergroup Contact Hypothesis*), sebagai pedoman untuk membantu siswa mengembangkan sikap dan tindakan antar-ras yang lebih positif.¹¹⁹ Menurut Allport, bahwa kontak antar kelompok akan meningkatkan hubungan antar kelompok ketika kontak tersebut ditandai dengan empat kondisi berikut:

- 1) Kesetaraan status, kesetaraan dalam suatu relasi antar kelompok terbukti efektif dalam mempromosikan sikap positif antar kelompok bahkan ketika kelompok tersebut awalnya berbeda dalam status;
- 2) Kesamaan tujuan, tujuan yang sama akan mendorong kelompok-kelompok yang terlibat untuk bekerja sebagai tim untuk mencapai tujuan tersebut;

¹¹⁸James A. Banks, "Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, and Practice," *Educational Research* 19 (1993): 3–49; James A. Banks, "Multicultural Education: Development, Dimensions, and Challenges," *Phi Delta Kappa International* 75, no. 1 (1993): 22–28.

¹¹⁹ Banks, "Multicultural Education: Characteristics and Goals," 21–22.

- 3) Kerja sama, terkait dengan poin b, kerja sama antar-kelompok menjadi pilihan tak terelakkan, sehingga demikian situasi yang terbangun adalah situasi yang kooperatif bukan kompetitif;
- 4) Dukungan otoritas atau regulasi yang tegas. Kontak antar-kelompok akan memiliki efek yang lebih positif bila didukung secara eksplisit oleh pihak berwenang, dalam konteks lembaga pendidikan dapat dilakukan oleh guru atau kebijakan lembaga. Sanksi otoritas menetapkan norma penerimaan dan pedoman tentang bagaimana anggota kelompok yang berbeda harus berinteraksi satu sama lain.¹²⁰

Oleh karena itu, pendidikan multikultural harus menciptakan lingkungan belajar yang memenuhi keempat kondisi tersebut, sehingga memungkinkan terjadinya proses interaksi yang dapat mengurangi sikap negatif (prasangka) di kalangan peserta didik, dan sebaliknya menumbuhkan sikap positif antar kelompok.

d. Pedagogi Kesetaraan

Kesetaraan dalam pendidikan merupakan dimensi penting dalam pendidikan multikultural. Kesetaraan yang dimaksud bukan sekedar kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak, tetapi juga pada prosedur dan model pembelajaran yang dapat memfasilitasi pencapaian akademik peserta didik dari kelompok ras, budaya, gender, dan kelas sosial yang beragam. Artinya,

¹²⁰ Thomas F. Pettigrew and Linda R. Tropp, "Allport's Intergroup Contact Hypothesis: Its History and Influence," in *On the Nature of Prejudice*, ed. John F. Dovidio, Peter Glick, and Laurie A. Rudman (Australia: Blackwell Publishing Ltd, 2005), 264–266.

pendidik harus menggunakan model dan pendekatan yang beragam yang disesuaikan dengan latar belakang kultural peserta didik.¹²¹

Pedagogi kesetaraan adalah proses pembelajaran dinamis yang tidak hanya berfokus pada identifikasi dan penggunaan teknik dan metode pembelajaran yang efektif tetapi juga pada konteks di mana mereka digunakan. Pembelajaran kooperatif, misalnya, dapat menjadi teknik pembelajaran yang efektif. Namun, harus digunakan dengan kesadaran akan masalah kontekstual seperti perbedaan status di antara siswa, jika tidak nicaya hal itu justru dapat memperkuat stereotip dan ketidaksetaraan di dalam kelas.¹²²

e. Pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial.

Dimensi penting lainnya dari pendidikan multikultural adalah budaya dan organisasi sekolah yang mempromosikan kesetaraan gender, ras, dan kelas sosial. Budaya dan organisasi sekolah harus dikontrol oleh semua warga sekolah dan ikut terlibat merestrukturasinya. Semua aktivitas pelayanan pendidikan, mulai dari input, proses hingga output harus dievaluasi dalam rangka menciptakan budaya sekolah yang memberdayakan siswa dari berbagai kelompok ras, etnis dan gender.¹²³ Struktur sosial dan budaya sekolah yang memberdayakan membutuhkan penataan kembali budaya dan organisasi sekolah sehingga siswa dari kelompok suku, etnis, dan kelas sosial yang beragam merasakan kesetaraan pendidikan dan

¹²¹Banks, "Multicultural Education: Characteristics and Goals," 22; Banks, "Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, and Practice," 6–7.

¹²²Selengkapnya lihat: Cherry A. McGee Banks and James A. Banks, "Equity Pedagogy: An Essential Component of Multicultural Education," *Theory Into Practice* 34, no. 3 (1995): 152–158.

¹²³Banks, "Multicultural Education: Characteristics and Goals," 20–22.

pemberdayaan. Dimensi pendidikan multikultural ini melibatkan konsep sekolah sebagai unit perubahan dan membuat perubahan struktural dalam lingkungan sekolah. Mengadopsi teknik penilaian yang adil untuk semua kelompok, menghilangkan kecurigaan, dan menciptakan kepercayaan di antara anggota staf bahwa semua siswa dapat belajar adalah tujuan penting bagi sekolah yang ingin menciptakan budaya sekolah dan struktur sosial yang memberdayakan.¹²⁴

Kelima dimensi pendidikan multikultural yang disebutkan di atas secara konseptual berbeda tetapi sangat terkait satu sama lain dan tak dapat dipisahkan. Integrasi konten, misalnya, menjelaskan setiap pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan konten tentang kelompok ras dan budaya ke dalam kurikulum. Proses konstruksi pengetahuan menjelaskan metode di mana guru membantu siswa untuk memahami bagaimana pengetahuan diciptakan dan mencerminkan pengalaman berbagai kelompok etnis dan budaya. Integrasi konten adalah kondisi yang diperlukan tetapi tidak cukup untuk proses konstruksi pengetahuan (yaitu, integrasi konten dapat berlangsung tanpa proses konstruksi pengetahuan). Namun, proses konstruksi pengetahuan tidak dapat dimasukkan ke dalam kurikulum tanpa adanya integrasi konten terlebih dahulu. Pengkajian dan penelitian lebih lanjut dalam pengembangan kelima dimensi tersebut selalu dibutuhkan dalam upaya pengembangan pendidikan multikultural yang ideal di masa depan.¹²⁵

¹²⁴Banks, "Multicultural Education: Development, Dimensions, and Challenges."

¹²⁵Banks, "Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, and Practice," 8.

C. Problem Integrasi Pendidikan Multikultural ke dalam Pendidikan Islam

Setelah membahas tentang multikulturalisme yang merupakan dasar historis dan ideologis pendidikan multikultural, yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan tentang pendidikan multikultural itu sendiri, maka pada bagian ini akan dicermati secara kritis kesesuaian konsep pendidikan multikultural diintegrasikan ke dalam pendidikan Islam, terutama dalam aspek ideologis-filosofis yang menjadi pijakannya. Aspek ideologis-filosofis multikulturalisme memainkan peran penting dan memengaruhi kebijakan publik maupun praktek multikulturalisme di lapangan. Menurut Zembylas, kebijakan pada dasarnya adalah teks yang mencerminkan ideologi dan asumsi filosofis yang mendasarinya. Dengan kata lain, kebijakan tidak berada dalam ruang hampa tetapi tertanam dalam wacana tertentu yang ditempatkan dalam bingkai sosial dan politik.¹²⁶ Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa pendidikan multikultural yang berkembang dan menjadi bagian dari kebijakan dan praktek pendidikan di berbagai negara Barat, adalah refleksi dari ideologi dan filosofi multikulturalisme berdasarkan situasi sosial politik yang melingkupinya.

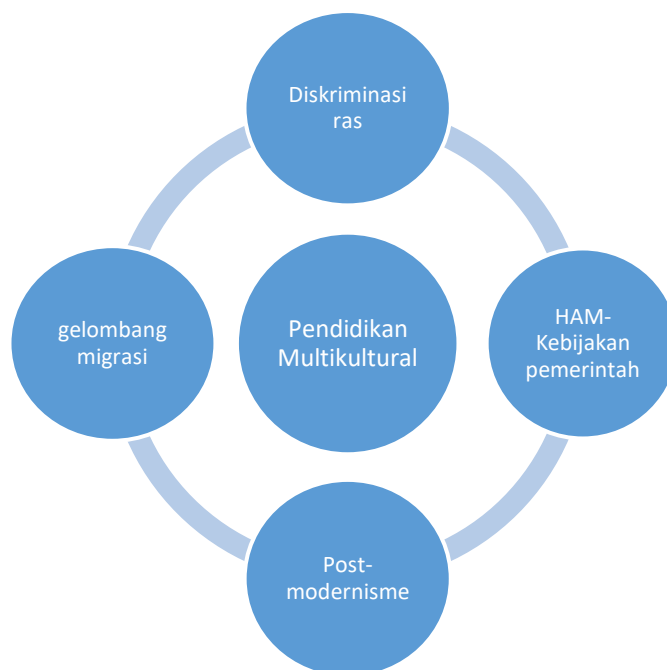
Ada dua hal penting yang perlu dicermati sebelum mengulas lebih jauh tentang kemungkinan integrasi pendidikan multikultural ke dalam pendidikan (agama) Islam. *Pertama*, setting sosio-kultural politik di balik kelahiran pendidikan multikultural; *kedua*, konsepsi ideologis-filosofis yang menjadi pijakannya.

¹²⁶Michalinos Zembylas, "Critical Discourse Analysis of Multiculturalism and Intercultural Education Policies in the Republic of Cyprus," *The Cyprus Review* 22, no. 1 (2010): 39–59.

Setelah mencermati sejarah kelahiran pendidikan multikultural, sebagaimana telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa secara umum kelahiran pendidikan multikultural dilatari oleh setidaknya beberapa hal berikut:

1. Praktek diskriminasi berbasis etnik dalam sejarah peradaban Barat—supremasi kulit putih sebagai warisan era kolonial—mendorong lahirnya gerakan sosial yang menuntut persamaan hak;
2. Gelombang migrasi melahirkan masyarakat yang semakin multikultur, khususnya di Amerika;
3. Kedua kondisi tersebut telah melahirkan gejolak sosial, seiring dengan menguatnya isu tentang Hak Asasi Manusia sehingga memaksa negara-negara Barat menerapkan kebijakan multikulturalisme dan atau interkulturalisme, demi mewujudkan stabilitas sosial;
4. Wacana postmodernisme yang menegaskan bahwa tak ada kebenaran tunggal, perbedaan kelas hanya warisan kolonial, turut memberikan legitimasi teoritis bagi konsep multikulturalisme.

Keempat faktor ini tidak berjalan terpisah, melainkan saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain, yang pada akhirnya melahirkan pendidikan multikultural, seperti diilustrasikan pada gambar 2.2. Dalam konteks inilah proses kelahiran pendidikan multikultural, sebagaimana telah diuraikan, melalui perjalanan panjang dan bertransformasi dari *intercultural* menjadi *multicultural*, seiring dengan dinamika sosial-politik suatu negara.



Gambar 2.2. Setting sosio-kultural politik kelahiran pendidikan multikultural

Pendidikan multikultural lahir sebagai respon terhadap situasi sosial masyarakat Barat di satu sisi, dan tuntutan masyarakat internasional tentang penegakan hak asasi manusia di sisi lain. Dengan demikian, pendidikan multikultural pada hakekatnya adalah bentuk pendidikan kewarganegaraan (*civic education*), yang diorientasikan untuk mewujudkan warga negara yang harmonis dalam kehidupan masyarakat yang semakin multikultural.

Hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah jika ingin mengintegrasikan atau mengadopsi pendidikan multikultural ke dalam pendidikan Islam, sejatinya diorientasikan pada bagaimana Islam menawarkan konsep pendidikan yang memungkinkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan bagi setiap elemen warga negara dalam sebuah masyarakat yang multikultur. Pendidikan yang membebaskan manusia dari diskriminasi atas nama ras, etnik, agama, serta latar belakang kultural lainnya. Relevansi dengan konteks sosio-politik-kultural di mana konsep itu akan

diterapkan tentu tidak bisa diabaikan, termasuk kesesuaiannya dengan ideologi negara yang bersangkutan.

Permasalahan berikutnya yang perlu dicermati adalah basis ideologis-filosofis pendidikan multikultural, yaitu multikulturalisme. Adopsi pendidikan multikultural, secara tidak langsung adalah bentuk penerimaan terhadap konsep multikulturalisme sebagai ideologi atau norma dalam menyikapi perbedaan dan keragaman. Dan apabila pendidikan multikultural ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan publik, maka secara otomatis mencerminkan penerimaan konsep multikulturalisme sebagai filsafat politik sekaligus. Pada titik inilah sebenarnya yang menimbulkan sikap resistensi dari sebagian umat Islam, khususnya di Indonesia. Apakah multikulturalisme yang diinternalisasikan melalui pendidikan multikultural sejalan dengan nilai-nilai Islam?

Ketika konsep pendidikan multikultural diwacanakan dalam pendidikan Islam di Indonesia, ada sejumlah kekhawatiran bahkan penolakan dari sebagian umat Islam terhadap konsep ini karena dianggap dapat mengancam akidah umat dan menggiring kepada relativisme agama.¹²⁷ Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) memperingatkan agar jangan sampai integrasi nilai-nilai pendidikan multikultural dalam pembelajaran PAI mendangkalkan akidah peserta

¹²⁷Nashruddin Syarief, "Breivik, Islam Dan Multikulturalisme," *Pemikiran Islam*, last modified 2014, accessed April 6, 2018, <http://pemikiranislam.com/2014/08/1206/breivik-islam-dan-multikulturalisme-2>; Lihat juga: .Nasip Mustafa, "Multikulturalisme Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Penelitian Keislaman* 10, no. 1 (2014): 27–43.

didik dan karenanya disarankan untuk tidak menghubungkan isu multikulturalisme dengan akidah.¹²⁸

Keberatan dan kekhawatiran tersebut tentu sangat beralasan, mengingat pendidikan multikultural bersentuhan dengan persoalan nilai, cara pandang dan perilaku bukan sekedar pengetahuan apalagi keterampilan (skill). Konsep tentang harkat dan martabat manusia, misalnya—yang diklaim sebagai basis pendidikan multikultural¹²⁹—tentulah berpijak pada konsep humanisme sekuler, karena seperti diketahui multikulturalisme lahir dari wacana sosial-politik masyarakat Barat sekuler, di mana standar nilai tentang harkat manusia berpijak pada konsep Humanisme.

Humanisme, menurut Nurullah Atas, adalah hasil nyata dari pertempuran yang dibuat peradaban Barat dengan Gereja Katolik. Gereja dan Tuhan dicoba untuk dilemahkan karena mereka dianggap sebagai alat penindasan yang mencoba untuk mengasingkan orang dengan nilai-nilai yang mengubah manusia menjadi seseorang, dan alat-alat ini dicoba diganti dengan manusia secara langsung.¹³⁰ Humanisme yang oleh Nasr disebut Humanisme Renaisans, memiliki karakteristik tertentu, yaitu: ia menganggap manusia sebagai makhluk duniawi yang mandiri, tidak lagi terintegrasi ke dalam kosmos total iman Kristen. Manusia baru yang dibayangkan oleh humanisme tidak lagi ditentukan oleh imannya kepada Tuhan dan

¹²⁸Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia, *Panduan Integrasi Nilai Multikultur Dalam Pendidikan Agama Islam Pada SMA Dan SMK* (Jakarta: Kirana Cakra Buana, 2011), 11.

¹²⁹Banks, "Multicultural Education: Characteristics and Goals," 3–4 Lihat juga: DomNwachukwu, *An Introduction to Multicultural Education*, 2–3.

¹³⁰Nurullah Atas, "Towards Comprehensive Religious Education (a Trial for New Research Ways within the Frame of Liberalism and Multiculturalism Concepts)," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 174 (2015): 131–136.

akhirat. Manusia baru itu juga menjadi satu-satunya makhluk cerdas di Bumi, satu-satunya yang memiliki "pikiran". Karakteristik utama manusia baru ini adalah individualisme dan rasionalisme. Individualitas manusia dipuji dengan mengorbankan yang universal, merasa dirinya sangat berbeda tidak hanya dari anggota peradaban lain tetapi bahkan dari orang-orang dari periode sebelumnya dalam sejarah Barat. Sedangkan rasionalitasnya adalah rasionalitas yang mengarah kepada pemisahan total dari filsafat dan wahyu.¹³¹

Dengan demikian, ada perbedaan paradigma ontologis antara humanisme (Barat, sekuler) dengan Islam dalam melihat harkat dan martabat manusia yang menjadi pijakan dari multikulturalisme dan pendidikan multikultural. Islam memandang manusia bukan sekedar makhluk fisik duniawi, tetapi juga makhluk spiritual yang memiliki relasi permanen dengan Tuhan. Perbedaan paradigma ontologis ini tentu saja berimplikasi terhadap cara pandang keduanya dalam mendefinisikan harkat-martabat manusia, kesetaraan dan keragaman.

Konsekuensinya, integrasi atau adopsi pendidikan multikultural dalam pendidikan Islam hanya dapat dilakukan dengan melepaskannya dari dasar filosofisnya, humanisme sekuler, dan menggantinya dengan pijakan filosofis baru yang lahir dari tradisi Islam. Dengan menggunakan paradigma multikulturalisme itu sendiri, umat Islam memiliki hak secara kultural untuk mendefinisikan konsep tentang manusia (humanisme Islam, humanisme religius) berdasarkan tradisinya sendiri, bukan manusia dalam perspektif budaya *mainstream* Barat (humanisme

¹³¹Selengkapnya lihat: Seyyed Hossein Nasr, *The Essential Seyyed Hossein Nasr*, ed. William C Chittick, *The Library of Perennial Philosophy*, Perennial. (Bloomington, Indiana: World Wisdom, Inc., 2007), 139–152.

sekuler). Pedagogi pendidikan Islam, sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibrahima Diallo, harus menempatkan nilai-nilai Islam pada titik pusat dan berfungsi sebagai kerangka epistemologis dan etis yang menyeluruh.¹³² Prinsip ini pula yang harus menjadi acuan dalam konsep dan praktek pendidikan multikultural yang Islami.

Dengan cara ini, di satu sisi, pendidikan Islam dapat mengembangkan paradigma multikultural yang Islami dalam merespon perkembangan masyarakat global yang semakin multikultur. Dan di sisi lain, resistensi dan kekhawatiran sebagian umat Islam terhadap pendidikan multikultural dapat dihilangkan atau paling tidak dikurangi.

¹³² Ibrahima Diallo, "Introduction: The Interface between Islamic and Western Pedagogies and Epistemologies: Features and Divergences," *International Journal of Pedagogies and Learning* 7, no. 3 (2012): 176.